Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H., M.Si.

Ekologi Administrasi

EDISI REVISI

EKOLOGI ADMINISTRASI

EDISI REVISI

EKOLOGI ADMINISTRASI

EDISI REVISI

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

EKOLOGI ADMINISTRASI

I. Ekologi Administrasi II. Manajemen III. Teks

EKOLOGI ADMINISTRASI

EDISI REVISI

Penulis:
Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.

Editor/ Penyunting:
Minan Nuri Rohman

Penyelaras Akhir:
M. Aqibun Najih

Cover & Layout:
st. Navisah

Penerbit:
Trussmedia Grafika
Jl. Dongkelan No. 357 Krapyak Kulon,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 0821 34 797 663
Email: one_trussmedia@yahoo.com

Cetakan Edisi Revisi, Maret 2015
viii + 80 ; 14 x 20,5 cm
ISBN: 978-602-0992-43-3

KATA PENGANTAR

Perkembangan zaman yang selalu terjadi perubahan membuat adanya tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai pelaku perubahan. Keterbatasan sumber daya mewarnai perkembangan manusia melakukan kerja sama, baik secara individu maupun kolektif (organisasi). Meskipun demikian, aktivitas kerja sama sudah ada sejak adanya peradaban manusia, dan pada zaman modern sekarang ini semakin mununjukkan kompleksitasnya dan menyangkut di semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, pemerintahan, sosial dan budaya, agama, bisnis, pertahanan dan keamanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh Karena itu, fenomena kerja sama organisasi bersifat universal, sedangkan ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang hubungan timbal balik antara organisasi dengan lingkungan sekitarnya adalah ekologi administrasi.

Buku berjudul *"Ekologi Administrasi"* ini secara konseptual mengelaborasi beberapa teori dan konsep terkait dengan ekologi administrasi. Penulis berharap buku ini dapat menjadi bahan bacaan atau referensi, baik bagi kalangan akadimisi, praktisi, mahasiswa serta umum.

Penulis sampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya hingga terwujudnya buku ini. Keterbatasan materi dan kekhilafan dalam buku ini tentu memerlukan adanya penyempurnaan di kemudian hari. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari para pembaca menjadi sesuatu hal yang sangat penulis harapkan.

Kepada Allah SWT secara khusus penulis mengharapkan rahmat dan ridho-Nya, semoga penulis selalu tekun dalam menuangkan ide-ide kritis dan visioner dalam sebuah karya ilmiah lainnya yang nantinya mampu memberi inspirasi dan manfaat kepada masyarakat luas, Amin.

Pekanbaru, Maret 2015

PENULIS

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintahan/ Administrasi Negara sebagai ilmu mempunyai sifat umum dan universal dalam arti memiliki unsur-unsur yang sama — dimana dan kapanpun ilmu pemerintahan diterapkan. Dalam kenyataannya dijumpai beberapa macam variasi dari gejala pemerintahan yang terdapat dalam beberapa kelompok masyarakat dari suatu bangsa atau di antara berbagai bangsa.

Pada negara-negara atau bangsa-bangsa yang ada di dunia banyak dijumpai sistem pemerinthan negara/ administrasi negara masih dapat kita jumpai sub sistem pemerintahan/ administrasi dari suatu kelompok masyarakat tertentu dari suatu bagian wilayah negara tertentu. Misalnya Pemerintahan Daerah.

Dalam hal itu ada hubungan pengaruh antara sistem pemerintahan/ administrasi negara atau pemerintahan/ administrasi daerah dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Dengan adanya pengaruh lingkungan sekitarnya, banyak para ahli mulai tertarik untuk mempelajari dan menggunakan metode

pendekatan yang analog dengan cabang ilmu Biologi, yaitu Ekologi yang mempelajari pengaruh hubungan timbal balik antara alam sekitarnya dengan bio-organisme (organisme hidup). Kemudian J.Wbews dengan metode tersebut menyelidiki ekologi manusia. Dalam studi Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara organisme dianalogkan dengan pemerintahan negara administrasi negara atau pemerintahan daerah administrasi daerah yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan lingkungan sekitarnya.

Lingkungan hidup sekitarnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor-faktor atau dimensi-dimensi yang berpengaruh terhadap sistem negara/ sistem pemerintahan daerah/ adminsitrasi daerah, yang disebut sebagai faktor atau dimensi pemerintahan/ ekologi administrasi negara.

Dalam pokok bahasan ekologi pemerintahan ini/ekologi administrasi negara, akan dibahas pengertian ekologi, hubungan ekologi dengan pemerintahan/ administrasi negara, perilaku pemerintahan/ administrasi, dimensi-dimensi ekologi pemerintahan/ ekologi administrasi negara, pengaruh ekologi terhadap pemerintahan/ administrasi negara.

A. Arti dan Pengertian

Ekologi sebagai suatu ilmu merupakan suatu cabang biologi yang menyelidiki hubungan organisme hidup dengan lingkungan dimana ia hidup. Menurut Webster Dictionary, ekologi adalah "*the branch of biology that deals with relations between living orgnism and the environment, in socilogy, that relationship between the*

distribution, of human grops with reference to material resources, and the consequent social and cultural patterns".

Pada mulanya studi ekologi dilakukan oleh para sarjana biologi yang menyelidiki hubungan perngaruh yang bersifat timbal balik antara organisme-orgnisme hidup dengan lingkungannya, baik hewani maupun tumbuhan.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, studi ekologi ini dikembangkan guna menyelidiki ekologi manusia atau human ecology, yang mana ternyata manusiapun memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya.

Ekologi berasal dari kata (bahasa) Yunani "oikos" yang artinya suatu rumah tangga. Ia bersangkutan dengan seluruh antar hubungan dari organime-organisme hidup dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan lingkungan hidup adalah keadaan sekitar yang melingkupi atau mengelilingi suatu organisme hidup atau suatu kehidupan.

Berkaitan dengan study pemerintahan, maka prinsip ekologi dapat dianalogkan bahwa pemerintahan sebagai "organisme" yang mempunyai hubungan pengaruh timbal balik dengan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup ini mempunyai berbagai macam faktor atau dimensi, dan faktor itu harus dipilih mana yang paling dominan untuk selanjutnya dijadikan faktor atau dimensi ekologi pemerintahan/administrasi negara.

Setelah diuraikan pengertian ekologi, perlu juga dipahami pengertian pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata "perintah, yang artinya bertujuan untuk menyuruh melakukan

sesuatu. Pemerintah, sebagai kata benda berarti suatu kekuasaan untuk memerintahkan suatu negara, sedangkan pemerintahan adalah suatu kegiatan, proses atau suatu prosedur bagaimana menjalankan perbuatan pemerintah suatu negara.

C.F Strong (dalam Ermaya Suradinata, 1993:8) membuat definisi pemerintahan dengan menekankan kepada kekuasaan untuk memelihara perdamaian dan keamanan serta pemaksaan hukum. Sedangkan W.S Sayre (1970:7) membuat definisi pemerintahan "(government) is best defined the organized agency of the state, expressing and exercising its authority" (Pemerintahan adalah sebagai lembaga negara yang terorganisir yang memperlibatkan dan menjalankan kekuasaannya).

Jadi dalam hal ini pengertian pemerintahan, erat sekali dengan kekuasaan, dapat dikatakan bahwa pemerintahan tanpa adanya kekuasaan maka tidak akan berfungsi.

Dalam prakteknya sehari-hari, kita sering mengartikan pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah atau pelaksana kekuasaan negara yang lazimnya disebut eksekutif. Dengan demikian kita dapat merumuskan bahwa pengertian pemerintahan mempunyai dua arti, yaitu dalam arti yang sempit dan arti yang luas.

Dalam arti sempit, pemerintahan adalah pelaksanaan pengurusan negara oleh eksekutif. Sedangkan dalam arti luas adalah seluruh kegiatan pengurusan negara oleh semua lembaga pemegang kekuasaan negara.

Ekologi memasuki khasanah literatur ilmu sosial dan administrasi negara (untuk selanjutnya disingkat a.n) jauh

sebelum ia menjadi populer pada media masa maupun kampus perguruan tinggi ditahun 1970-an, sebagai sebuah kata yang sama artikan dengang perlindungan terhadap keindahan bentang alam. Sebebarnya istilah ini berasal dari kata Yunani kuno “oikos”, berati tempat hidup, dan digunakan secara luas pada abad XIX oleh para ahli hewan dan tumbuhan Darwinian untuk menggambarkan bagaimana organisasi hiduup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Para sosiolog ditahun 1920 meminjam ide-ide ekologi tumbuhan dan hewan berikut penerapannya terhadap kehidupan manusia; mereka menekankan interdependensi kehidupan manusia dalam sistem organik yang semakin komplek dan kecenderungan sistem kehidupan bergerak menuju ekuilibrium, atau stabilisasi bentuk hidup dalam hubungannya dangan lingkungan sekelilingnya.

Ekologi dikenal sebagai perbendaharaan kata a.n terutama melalui tulisan-tulisan seorang mantan Profesor havard, John M. Gaus (1894-1969), setelah seorang pelopor a.n; ia menguraikan ekologi dengans serangkaian perkuliahan kesohorannya di Universitas Alabama tahun 1945, dan selanjutnya terbit dengan judul “Reflectins on Public Administration”.

Dalam buku tersebut, demikian pula dalam tulisannya yang lainnya, Gaus secara khusus menyusun pola dan ide-ide a.n kedalam struktur menyeluruh isu-isu dan ivent-ivent masyarakat Amerika modern. Lebih baik dari pada kebanyakan peneliti lain, ia menunjukan bagaimana a.n, perkembangannya, dan aktivitas-aktivitasnya dipengaruhi lingkungannya, atau ekologinya.

Menurut pendapatnya, ekologi berkaitan dengan interrelationship (saling berhubungan) organisma hidup dengan

lingkungannya. Dengan demikian, pendekatan ekologi terhadap a.n benar-benar dibangun dari dasar; dari elemen-elemen sebuah tempat – tanah, iklim, lokasi, sebagai contoh – usia dan banyaknya serta pengetahuan, dan cara-cara tekno lagi sosial serta fisik suatu tempat dan dalam hubungannya satu sama lain, dalam mempertahankan kehidupannya. Bagi Gaus, sistem administrasi tidak mungkin terlepas dari kait-mengkait dengan struktur kemasyarakatan. Lebih khusus, ia menggambarkan beberpa elemen yang sangat bermanfat "untuk menjelaskan pasang surutnya fungsi-fungsi pemerintahan; masyarakat, tempat, teknologi fisik dan sosial, harapan dan gagasan, katastropi (malapetaka), serta kepribadian". Ia menunjukkan pentingnya faktor-faktor ekologis tersebut dalam pilihan ikhtisar "Reflections on Public Administration" sebagai berikut.

Gaus mulai mengajar ilmu politik tidak lama setealh Perang Dunia I (sebelum ke Harvard ia mengajar di Universitas Wisconsin) dengan keterkaitannya dengan a.n. Ia menyelingi kegiatan mengajarnya dengan tugas-tugas administrasi nasional maupun negara bagian, dan ia membawa pengalaman-pengalaman praktisnya didepan kelas. Sepanjang karirnya, Gaus terpesonakan oleh saling pengaruh-mempengaruhinya kekuatan a.n dengan masyarakat luas.

Gaus bekerjasama dengan Frederick Jackson Turner, seorang sejarawan Amerika awal abad XX yang menuangkan keatas peta, sampel tanah, data statistik wilayah, dan arsip suara pemilih dalam studi empiris mengenai pertumbuhan Bangsa Amerika. Demikian pula, Gaus mengajak mahasiswanya mengamati lingkungan

administrasi sehingga memahami bagaimana karakteristik ekologi mempengaruhi lembaga administrasi. Bagi Gaus, istilah ekologi bukan hanya relevan untuk memisahkan sarjana administrasi yang sedang bergelut dengan teori-teori universal proses administrasi, namun pula bagi para praktisi administrasi dilapangan. Suatu pemahaman yang baik terhadap faktor-faktor ekologis menjadikan para administrator dapat menanggapi lebih arif tuntutan serta tantangan lingkungan eksternal organisasinya. Dengan demikian, ditangan seorang praktisi, ekologi bisa menjadi sebuah alat diagnosa; ia bisa membantu memvisualisasikan elemen-elemen utama proses administrasi dan memberi suatu alat ukur untuk menilai dampaknya terhadap sebuah organisasi. Walau demikian, Gaus menyadari bahwa prediksinya tidaklah sederhana : “Tugas memprediksikan akibat-akibat tindakan kontemporer, memnerikan adjusment yang diperlukan, adalah sangat sulit terhadap individu atau dalam kehidupan keluarga. Kesulitan tersebut akan meningkat dengan ukuran serta kompleksitas unit dan ekspansi serta jangkauan variabel.

Kepedulian Gaus terhadap ekologi administrasi didorong oleh suatu hirauan khusus terhadap “perubahan”. Ia merupakan anggota sebuah generasi yang diguncang oleh penderitaan katastropi depresi ekonomi di tahun 1930-an, dan ia melihat bentang alam Amerika dengan cepat bergeser dengan berbagai jalan. Sebagaiman ia amati, perubahan yang telah mengganggu lingkungan tempat tinggal; telah menghancurkan stabilitas kultur, telah memaparkan jalan lintas benua, migrasi yang tanpa henti ke kota dan kembali bertani, dari satu pekerjaan ke pekerjaan

lainnya, telah diterima secara luas. Manfaat-manfaat tersebut begitu spektakuler tentunya, bahwa kita memahaminya sebagai kemajuan.................. kerugian-kerugiannya menjadi semakin terlihat pula, terlihat dalam kehancuran yang begitu dramatis dari depresi, lebih terasa lagi kepada mereka yang tertimpa, disintegrasi serta frustasi para individu .... "Gaus mengahrapkan a.n untuk mencari sumber penting baru, kesempatan bagi individu untuk menyadari berbagai pengaruh situasi yang dihadapinya". Dalam sebuah essay. "American Society and Public Administration", menyatakan : "Tesis saya adalah bahwa dengan melalui instrumen publik, beberapa dasar kelembagaan baru yang akan menjadikan individu mampu memperoleh peningkatan dan kepuasan yang bisa dilakukan dan maksud-maksud tujuan akan berkembang lagi".

Gaus merasa pesimis maupun optimis terhadap kondisi masyarakat manusia. Rasa pesimis tersebut terpancar ketika melihat perubahan yang menghancurkan pola-pola kekeluargaan yang ada terhadap generasinyanya, melemahnya stabilisasi susunan kelembagaan, dan menghadapkan individu-individu pada kesulitan ekonomi serta personal yang serius. Namun begitu ia merasakan sebuah harapan cerah bagi ilmu sosial terapan : melalui pendekatan ekologi terhadap a.n ia yakin bahwa pola-pola kelembagaan baru maupun yang diperbaharui dapat direncanakan kehidupan individu dalam era perubahan ini. Ekologi dalam a.n bagi Gaus menjadi instrumen vital dalam memahami, mengarahkan, dan mengendalikan goncangan perubahan yang sangat kuat dalam kehidupan dewasa ini. Selama lebih dari 40 tahun berlalu sudah sejak studi ekologi Gaus diterbitkan, Sarjana-sarjana yang lebih

muda dibidang tersebut, seperti halnya Fred Riggs, telah aktif menerapkan secara luas pendekatan ekologi, terutama dibidang a.n komperatif dan developmental (perbandingan serta perkembangan) yang lebih baru.

Pada saat membaca pilihan berikut, camkanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

Mengapa Gaus berpendapat bahwa pengetahuan mengenai lingkungan umum begitu penting bagi para administrator?

Jika anda hendak merubah essay tersebut untuk pembaca saat ini, faktor-faktor lingkungan apakah yang mempengaruhi a.n modern, dimana mungkin anda akan menambahkan daftar Gaus? (anda mungkin memasukkan, misalnya kesenjangan generasi serata faktor-faktor jenis kelamin dan etnis).

Dengan cara bagaimanakah admiistrator mengenali perubahan-perubahan dilingkungan umum?

Berapakah pengorbanan yang harus dicurahkan terhadap kegagalan organisasi dalam menghadapi dengan cepat dan tepat perubahan lingkungan eksternal?

Ketika anda membaca essay Gaus, pikirkan relevansinya dengan studi kasus I, “The Blast in Centralia No. 5”. Bagaimanakah faktor-faktor ekologi mempengaruhi akibat kasus ini?

B. Hubungan Ekologi dengan Pemerintahan/ Administrasi Negara

Sebagaimana telah diuraikan bahwa ekologi adalah hubungan pengaruh yang bersifat timbal balik antara organisme-organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam hal ini pemerintahan/

administrasi negara dianalogikan organisme hidup, yaitu seluruh kegiatan pengurusan negara/daerah oleh semua lembaga pemegang kekuasaan. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan itu berlangsung dalam suatu organisasi publik, yang merupakan administrasi negara/ daerah. Sedangkan lingkungan dapat berupa alam (fisik) dan sosial (kemasyarakatan).

Dari tiga pendapat para ahli administrasi negara Pfifner, Presthus dan Sharkansky (dalam Pamuji, 1998:21) yang merumuskan definisi administrasi negara, dpat diambil kesimpulan bahwa asdministrasi negara/daerah adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan untuk melaksanakan kebijakan –kebijakan pemerintah.

Setiap bangsa yang modern akan mengenal perbedaan antara fungsi-fungsi politisi dan administrasi dari pemerintahan. Perbedan antara kedua fungsi ini menjadi jelas setelah kedua sarjana ilmu politik masing-masing Woodraw Wilson dan Frawnk J. Goodnow mengemukakan pendapatnya.

Wilson dan Goodnow mengemukakan bahwa setiap pemerintahan mempunyai dua fungsi pokok yaitu :

a. Politik, segala sesuatu yang berhubungan dengan pernyataan kehendak dari pada negara (Legislatif);
b. Administrasi, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kehendak tersebut (Eksekutif).

Namun kedua fungsi tersebut tidak boleh dipisahkan secara tajam. Kedua-duanya merupakan bagian yang integral dan

independen (saling bergantung satu sama lain) dari proses pemerintahan.

Asas pembagian ini hanyalah berarti bahwa golongan politisi mengkhususkan diri pada soal-soal pembuatan kebijakan *(policy making)* sedangkan golongan administrator mengkhususkan diri pada soal-soal administrasi *(policy executing).*

Jadi jelas bahwa pemerintahan mempunyai wajah sebagai fungsi, terdiri dari kegiatan dan tindakan-tindakan untuk melaksanakan kehendak dari pada negara, kehendak mana tercantum dalam kebijakan umum yang telah dirumuskan sebagai hasil dari fungsi politik.

Ditinjau dari segi “proses”, jelas bagi kita bahwa pemerintahan merupakan seluruh kegiatan gerak-gerik manusia mulai saat menentukan tujuan apa yang akan dicapai sampai pada penyelenggaran mencapai tujuan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam proses administratif itu didalam pemerintahan disebut dengan istilah departemen, badan-badan, instansi vertikal dan dinas-dinas. Dengan demikian prose pemerintahan ialah serangkaian kegiatan yang meliputi membuat rencana-rencana, mengambil keputusan-keputusan, dan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk melaksanakan/ menyelenggarakan organisasi publik. Organisasi publik itu bertugas melayani anggota masyarakat, oleh karenanya organisasi publik kadang-kadang diartikan abdi rakyat. Kebutuhan masyarakat disalurkan kepada badan-badan pembuat politik *(policy making organism)* dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk Undang-Undang,

peraturan dan keputusan-keputusan, dan kemudian ditugaskan kepada badan-badan administratif untuk melaksanakan kebijakan *(policy)* tersebut yang merupakan manifestasi (perwujudan) dari kepentingan masyarakat.

Untuk menjelaskan hubungan ekologi dengan pemerintahan/ administrasi negara, pertama-tama perlu diperhatikan tinjauan ekologis, yang memperhitungkan lingkungan *(environment),* dan kedua melihat pemerintahan/administrasi negara sebagai sistem yang terdiri dari *input (*masukan-masukan), proses, *output* (keluaran), dan *feedback* (umpan balik). Sebagai suatu sistem, pemerintahan mempunyai lingkungan *(environment),* masukan-masukan *(input),* proses (aktivitas), keluaran-keluaran *(outputs)* dan upan balik *(feedback)* yang saling berhubungan dengan berinteraksi satu sama lain. Rangka dasar seperti ini membimbing pemikiran kita tentang peristiwa-peristiwa secara universal di semua lembaga pemerintahan/ administrasi negara dan di semua tingkat pemerintahan/ administrasi negara, termasuk Pemerintah Daerah.

Uraian ekologi pemerintahan sebagai suatu hubungan dapat dijelaskan pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Ekologi dan Pemerintahan/ Administarasi
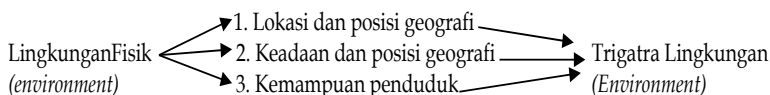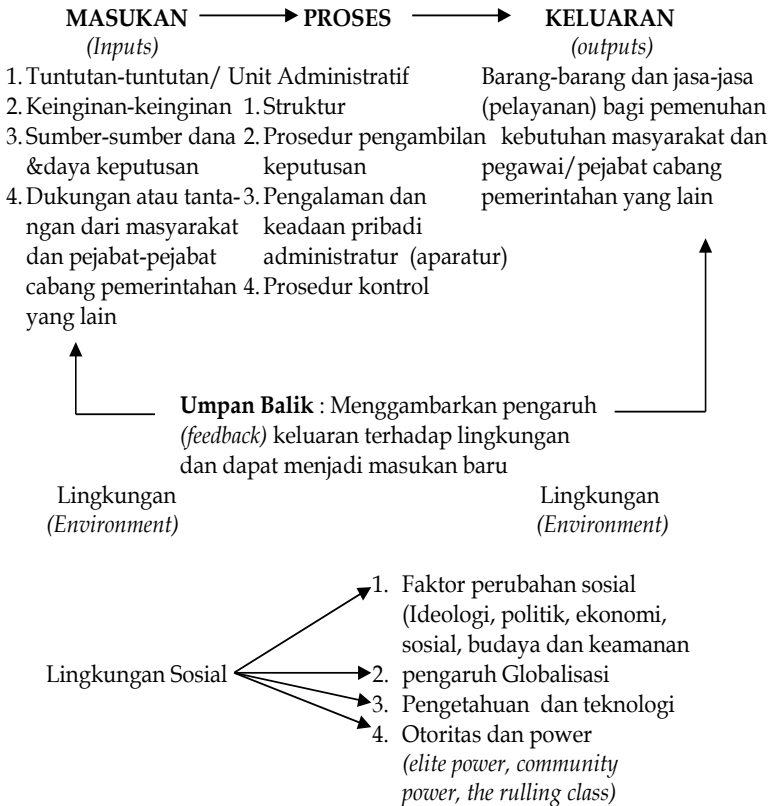
Studi a.n harus meliputi ekologina. “Ekologi”, dalam webster Dictionary, “sebagai saling berhubungan, secara kolektif, antara organisma dengan lingkungannya”. J.W. Bews menjelaskan bahwa kata itu sendiri berasal dari bahasa Yunani “oikos”, sebuah tempat tinggal atau rumah, kata demikian sebagaimana dalam perekonomian (economy) dan ilmu ekonomi (economics). Ilmu ekonomi merupakan subyek dimana ekologi turut serta, namun ekologi jauh lebih luas. Ia berkaitan dengan semua interrelation

ship organisma hidup dengan lingkungannya. Beberapa ilmuan sosial telah kembali menggunakan istileh tersebut, terutama digunakan oleh ahli biologi dan tumbuhan, khususnya dibawah rangsangan pengkajian antropologi, sosiologi, dan pelopor-pelopor yang menentang klasifikasinya, seperti halnya yang terakhir Sir Patrick Geddes di Inggris. Dalam perkuliahannya aliran Frankrut telah menyatakan, perkaitan antara daerah fisik, kependudukan, transport dan pemerintah yang secara nyata terlihat. Baru-baru ini, Charles A. Beard merumuskan sejumlah eksioma pemerintah dimana perubahan lingkungan dikaitkan dengan a.n yang dihasilkan. Saya diperkenalkan, ia mengatakan, mengapa ia bermanfaat, dan membuktikannya bermanfaat, rancangan eksioma-aksioma atau aphorisme berikut terhadap a.n, karena sesuai dengan alasan-alasan penting ini:

1. Pelaksanaan yang agak efisien dan berkesinambungan dari fungsi-fungsi tertentu oleh pemerintah, pusat dan lokal, merupakan kondisi yang diperlukan bagi eksistensi masyarakat luas.
2. Karana masyarakat menjadi semakin komplikatid, devisi pegawai bercabang semakin luas, perniagaan meningkat, teknolohgi mengambil alih pekerjaan tangan dan kemandirian lokal, fungsi-fungsi pemerintah semakin meningkat dalam jumlah dan dalam hubungan-hubungan vital terhadap nasib masyarakat serta individu.
3. Pemerintah dalam suatu masyarakat yang komplikated semacam ini, sebagai akibat masyarakat itu sendiri, adalah

kuat dalam proporsi kepastiannya untuk mengadministrasi fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan.

4. Undang-undang yang hirau terhadap fungsi-fungsi tersebut, sesulit itu, secara relatif mudah ketika dibandingkan dengan pemberlakuan undang-undang (U.U), hal itu merupakan langkah efektif fungsi-fungsi ini dalam pencabangannya yang sangat rinci dan untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Ketika bentuk pemerintahan, seperti yang dimiliki, memperlengkapi perubahan-perubahan legal, melalui proses diskusi maupun diskusi terbuka, untuk menyesuiakan perubahan sosial, administrasi yang efektif dan bijaksana menjadi prasyarat utma bagi perduransi (perdurance)pemerintah dan masyarakat – dengan menggunakan sebuah kiasan, menjadi fondasi pemerintah sebagai perusahaan yang berjalan dengan baik.
6. Jika anggota-anggota sistem administrasi tidak diambil dari beragam golongan dan wilayah, jika karir tidak terbuka terhadap kemampuan dasar, jika metode tidak disiapkan melalui sebuah skema pendidikan umum yang sesuai, jika metode tidak disiapkan melalui sebuah skema pendidikan umum yang sesuai, jika pegawai-pegawai pemerintah tidak ditujukan terhadap kritisme internal dan eksternal terhadap hakekat konstruktif, kemudian personil pemerintah akan menjadi birokrasi yang membahayakan bagi masyarakat serta pemerintah yang dikenal baik.

7. Jika, sebagaimana baru-baru ini disampaikan oleh David Lilienthal dalam sambutannya pada Tennessee Valley Authority, sebuah sistem administrasi tidak dikonstruksi dan dioperasikan sehingga tetap menghidupkan tanggung jawab lokal dan individual, hal ini mungkin merusak basis aktivitas, harapan, dan antusiasme yang perlu bagi pemerintah yang populer dan berikutnya terhadap suatu peradaban demokrasi.

Pendekatan ekologi terhadap a.n benar-benar dibangun dari yang paling dasar; dari elemen-elemen atau tempat – tanah, iklim, lokasi, misalnya – kepada masyarakat yang tinggal disana – jumlah dan usia serta penegtahuan mereka, dan metode-metode teknologi sosial dan fisik melalui tempat dan hubungan satu sama lainnya, mereka peroleh penghidupan.

Yakni di dalam lingkungan dimana prkatek serta instrumen-instrumen rumah tangga pemerintah seharusnya dipelajari sehingga mereka bisa memahami lebih baik apa yang sedang mereka lakukan, dan menilai secara wajar bagaimana mereka melakukannya. Pendekatan demikian merupakan daya tarik tersendiri bagi kita sebagai mahasiswa yang sedang berupaya bekerja bersama dalam pengkajian kita; karena ia mengundang -- tentunya bergantung pada – pengamatan yang sungguh-sungguh oleh banyak masyarakat dalam lingkungan berlainan sebagai akar dari fungsi-fungsi pemerintah, sikap masyarakat, masalah-masalah operasional.

Tanpa mengklaim orisinalias, walaupun, dan tentunya dengan setiap penekanan pada hakekat kerjasama tugas tertentu, saya memberikan sebelumnya daftar faktor-faktor yang sangat berguna ketika menjelaskan pasang surutnya fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka adalah: masyarakat, tempat, teknologi fisik dan sosial, keinginan dan ide-ide, katastropi, dan personalitas. Saya telah membuat selama bertahun-tahun sebuah text book yang luwes dalam suatu kumpulan kliping, artikel serta ilustrasi buku masing-masing, seperti yang dilakukan banyak orang untuk sendiri. Ilustrasi "bahan mentah politik" demikian dan karenanya administrasi, sebagai bagian ilmu yang memaparkan dan menginterprestasikan mengapa aktivitas-aktivitas tertentu diselenggarakan melalui pemerintah dan masalah-masalah kebijkan, organisasi dan manajemen biasanya merupakan hasil dari sumber-sumber seperti itu.

Dengan mengilustrasikannya secara konkrit hubungan faktor-faktor lingkungan ini, sebuah tes kooperatif teori tertentu akan dipermudah. Perubahan dalam mendistribusikan masyarakat sebuah unit pemerintah melalui waktu, usia dan tempat menjelaskan asal mula kebijakan dan administrasi pemerintah. Pada sensus 1, kita merupakan 80 % masyarakat hidup sebagai petani; pada sensus kita terakhir, seratus lima puluh tahun kemudian, 80 % masyarakat kita tidak hidup dari bertani.

Lebih dari sepertiganya saat ini tinggal di wilayah metropolitan yang relatif sedikit; namun pertumbuhan daerah ini tidak berada di pusat kota; ia berada disekitar kota pinggiran, kesatuan politik

tersendiri, tidak bersama dengan pusat kota, yang kerap kali benar-benar menurun populasinya, masalah-masalah rumah tangga pemerintah sebuah organisme metropolitan yang mana tidak -- atau tidak memadai -- adanya organisasi politik. Populasi semakin meningkat denga proporsi yang lebih luas distribusi diantara golongan usia lanjut. Fakta-fakta mentah ini -- terlalu sedikit dikenal dan dihargai oleh masyarakat, yang seharusnya pertama kali ditempatkan sebelum mereka dalam mendiskusikan sejumlah pertanyaan pemerintah kita -- menjelaskan mereka sendiri banyak mengenai fungsi-fungsi pemerintah.

Seringkali dengan faktor-faktor tempat dan teknologi, mereka banyak menjelaskan isu yang biasanya dinyatakan dalam konflik-konflik hampa. Sebagai contoh, seorang tua dibanyak keluarga besar yang hidup dengan bertani seabad yang lalu, dimana banyak barang dan jasa yang dicurahkan keprtanian, masih melakukan fungsi dan melakukan dan suatu tempat yang lebih bermanfaat dalam kehidupan generasi muda keluarganya. Dalam sebuah perekonomian kehidupan keluarga, mengabaikan alokasi pekerjaan dan upah dari sebuah masyarakat industri, permodalan untuk pensiun menjadi sangat menarik.

Perpindahan masyarakat (melalui sifat-sifat usia dan golongan berpenghasilan) dari pusat kota kepinggiran (sebagaimana ditunjukkan oleh faktor-faktor ruang-waktu dan biaya untuk menuju ketempat bekerja, tutup pusat pertokoan, pencarian industri terhadap ruang tanah bagi produksi stright-line yang dipermudah dengan jalan-jalan beraspal, truk serta distribusi energi listrik melalui kabel, dan perubahan-perubahan teknologi lainnya, dan

perubahan-perubahan terhadap apa yang kita inginkan didalam lingkungan tempat tinggal) menimbulkan reaksi-reaksi dalam harga tanah dan bangunan, dalam tarif pajak bagi jasa kemasyarakatan yang telah ada di wilayah sebelumnya dan diminta dalam wilayah yang baru, dengan persyaratan yang berbeda dan kapasitas untuk membayar dari masyarakat bagi pemukiman (meliputi tempat dan perlengkapan di sekitarnya) dan dalam pengaturan transportasi dan syarat kemanfaatan terhadap organisma metropolitan yang berubah terus.

Dengan demikian, faktor-faktor masyarakat dan tempat merupakan keterkaitan yang tidak mungkin terpisahkan. Dan bukan hanya pada pusat-pusat keramaian kota. Saya telah mengamati proses perubahan yang sama di wilayah pemukiman daerah pertanian dan hutan yang jarang, dan pengaruhnya yang kuat terhadap pemerintah.

Dimana terdapat wilayah-wilayah *cut-over* yang luas di Lake State (negara bagian Lake), dimana tanah-tanah New England atau New York tidak lagi menguntungkan bagi pertanian dan reboisasi adalah terlalu dini untuk menghasilakan panen kayu, Great Plains dimana tanah-tanahnya sangat cocok untuk berternak dan dengan curah hujan terbatas yang digunakan untuk pembajakan, ditanah-tanah cut-over dan erosi Shouthern Piedmont, atau didaerah antrasit Pensylvania, kondisi fisik – habisnya sumber daya yang semula untuk pemukiman – telah menimbulkan mata rantai akibat-akibat institusional. Nilai tanah dan pembayaran pajak menurun, tanah penunggak pajak dikembalikan ke country (kabupaten, daerah atau wilayah) atau negara bagian, sekolah-sekolah negeri, jalan dan jasa-

jasa yang lainnya tidak lagi dibiayai secara lokal. Pemulihan segera melalui bantuan finansial negara atau jasa-jasa yang diatur negara pada gilirannya tidak cukup ketika katastropi depresi ekonomi mengurangi pendapatan negara. Upaya-upya yang diarahkan bagi pemulihan sumber produksi, seperti halnya mendorong perkayuan melalui pernbaikan perpajakan atau membuat hutan rakyat yang memadai bagi industri-industri yang menggunakan kayu secara permanen, atau perbaikan tanah, akan memerlukan periode waktu yang lama untuk mengefektifitasnya, dan sama memerlukan suatu kondisi atmosfir dimana kekepimpinan politik, integrasi nasional yang hati-hati, kebijakan-kebijakan badan hukum, negara bagian, lokal, serta individu, dan personil teknik ahli dapat diadakan dan didukung terus menerus. Atmosfir seperti ini, bagaimanpun, tak mungkin hadir diantara masyarakat frustasi diwilayah tersebut, atau masyarakat terlayani lebih baik dari wilayah lain menyerukan pajak mereka bagi unit-unit pemerintah lokal diwilayah-wilayah dimana mereka belum pernah melihat atau permasalahannya tidak mereka pahami. Perubahan demikian sebagai ganti, atau penggunaan sumber daya dan produk suatu tempat, merupakan paksaan terhadap efeknya bagi a.n.

Generasi saya sendiri telah memiliki pelajaran pentingnya perubahan teknologi fisik dalam menyaksikan pemakaian kenderaan dan peran yang memainkan, kiranya diperlihatkan bahwa penggunaannya yang terbesar luas dimungkinkan oleh pembangunan jalan raya beraspal yang diadakan terutama sebagai layanan masyarakat. Perluasan dan desain jalan raya telah mendapat pengaruh dari desakan kekuatan-kekuatan politik yang ditimbulkan

oleh temuan *(invention)* fisik. Kelompok para pengguna mobil, pengusaha, pemilik hotel, pembangun jalan, pensuplai bahan-bahan dan mesiin pembangunan jalan, orang berusaha bekerja dibidang administrasi dan kontruksi jalan serta lainnya, harus berhadapan dengan para penunggang kuda, pembuat perlengkapan kereta dan kuda serta mereka yang menentang naiknya tarif pajak dimana jalan-jalan beraspal mungkin membutuhkannya. Sebab-sebab awalnya – gabungan dari temuan-temuan fisik seperti halnya mesin pembakaran dan vulkanisir karet – mengaburkan pertikaian yang ada terhadap perpajakan, persyaratan asuransi hutang dan pemeriksaan bagi surat izin pengemudi, maupun terhadap kemanfaatan atau kerusakan dari sistem pengawasan lalu lintas atau biaya bagi jembatan penyeberangan dan jalan raya cepat. Masyarakat menyalahkan para birokrat dan politisi karen sebab-sebab ekologis mendasar belum dijelaskan padanya.

Proses penyesuaian fungsi pemerintah mungkin pula dirubah oleh adanya perubahan-perubahan – seperti kita lihat, misalnya dengan ketertinggalan canals (terusan) yang dibiayai dan dikonstruksikan oleh pemerintah, ketika teknologi-teknologi transportasi baru membuatnya usang.

Perubahan dalam teknologi fisik, betapapun lambatnya pengaruh-pengaruh institusional mungkin menyebar, adalah lebih jelas bahkan pada titik yang dramatis terhadap masyarakat. Namun kerapkali melupakan pentingkan temuan perangkat serta lembaga-lembaga sosial, dan pengaruhnya yang mendasar kita terus-menerus. Dengan demikian aplikasi serta penyatuan penghematan berbagai hal melalui temuan korporasi (perusahan)

telah menciptakan kekuatan baru bagi reaksi melalui tata aturan masyarakat, menghilangkan susunan hubungan manusia dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru perusahaan bersekala luas yang secara finansial mampu menggunakan personil dan peralatan secara ekstensif dan menimbulkan hubungan baru antara pembeli dan penjual, majikan dan karyawan – melalaui mana desakan-desakan terhadap keseimbangan kekuatan baru melalui konsumen, standar karyawan dan investor telah berjalan.

Anda akan melihat betapa saling berkaitan dari semua faktor-faktor ini dalam pelaksaaannya. Mungkin hal yang paling tajam adalh dimana saya memiliki kesulitan untuk menemukan istilah yang memuaskan. Saya telah menggunakan kata-kata “keinginan dan gagasan” (wishes and ideas). Apa yang anda tidak tahu, dikatakan tidak akan melukai anda. Saya ingin mengatahui apakah hal itu benar. Jika anda sungguh-sungguh mengetahui bahwa sejumlah obat baru, metode pengobatan penyakit, akan mencegah penderitaan atau kematian pada anda, anda akan melakukan tindakan baru, metode pengobatan yang sangat penting.bahkan jika tindakan tersebut memerlukan program pemerintah. Jika anda mengetahui atau mengira tahu bahwa gabungan tindakan administratif dan legislatif akan melindungi deposito bank anda atau asuransi terhadap kerusakan, gagasan tersebut akan memiliki pengaruh memaksa bagi tidakan politis anda. Jika anda berpikir pejabat-pejabat pemerintah korup, bahwa undang-undang tarif atau peraturan dagang merupakan sebuah “raket”, itu akan mempengaruhi keputusan politik pada sat itu.

Jika anda berpikir kesejahteraan materi, dan bahwa keinginan tersebut memerlukan bentuk sebuah rumah berikut taman dan kebun, ada konsekuensi-konsekuensi yang terelakan dalam standar layanan masyarakat *(public service)* yang hendak mempermudah realisasi keinginan anda. Sampai pada jalan penjang itu seseorang akan menemukan asuransi pengadaian pemerintah guna mendapatkan suku bunga lebih rendah serta ordonansi zoning dan keuangan jangka panjang.

Para pemula dari ide-ide dan sosial demikian pula temua fisik adalah seseorang. Kita, mahasiswa a.n akan melakukan dengan baik untuk mengkaji unsur-unsur yang berpengaruh dimana Beentham, Webbs, perencana kota Burnham, pegawai kesehatan Biggs, pelopor Biro Riset Kota New York berikut Sekolah Pelatihan Jasa Kemasyarakatan telah berpengaruh. Persiapan terkait, usia lanjut sumber daya personil maupun institusional untuk penelitian, murid-murid yang simpatik situasi katastropi yang sering terjadi dimana sikap-sikap yang ada hancur dan Menerima ide-ide baru untuk diterapkan, saluran-saluran komunikasi dan publikasi pada umumnya, demikian pula kualitas inti industri dan integritas semua, atau hampir semua dalam suatu kombinasi akan ditemukan. Kita masingmasing akan berhubungan dengan salah seorang macam ini, mungkin, jalan masyarakat kita sendiri; jika bukan sebagai pelopor untuk temuan baru, seorang interpreter Masyarakat, agitator, atau organisator. Oleh karena itulah seorang mantan Gubernur Allerd E. Smith memiliki pemikiran untuk menggabungkan perasaannya terhadap kebutuhan Masyarakat, pengalamannya di sebuah partai

dan proses legislastif dan posisinya sebagai gubernur untuk suatu program administrasi dan politik dimana pengetahuan tentang banyak orang sangat efektif digunakan dalam pelayanan negara bagian New York.

Katastropi, khususnya ketika kepemimpinan dan pengetahuan di persiapkan dengan program jangka panjang kedalam tindakan pemulihan segera dapat dilakukan, memiliki tempat pada ekologi administrasi. Ini bukan hanya destruktif, Sehingga pamulihan dan pembenaran diperlukan dalam skala yanq begitu luas bahwa tindakan bersama itu perlu, namun ini akan pula mengganggu, desakan maupun tantangan-tantangan sikap dan pendapat, dan membuka kedalam begitupun kepada yang lain suatu respek dan alasan menyelamatkan muka untuk merubah pandangan seseorang seperti halnya pada kebijakan.

Bom atom memberi banyak kemungkinan alasan menentukan bagi perubahan sikap organisasi Internasional. Namun demikian saya condong terhadap pandangan bahwa efek-efek katastropi pada pemikiran kita relatif tidak lama, dan meyakinkan pada perubahan-perubahan institusional yang relatif lebih kecil, dan kekuatan lama itu kembali muncul dengan kekuatan yang besar untuk manghapus banyak reaksi pertama. Sebuah masyarakat yang frustasi dan ketakutan adalah bukan sesuatu perubahan yang benar-benar signifikan akan mulai berakar, jika persiapan yang hati-hati dan administrasi yang bijaksana periode pemulihan tidak tersedia. Kebakaran klub malam di Boston tahun terakhir ini di mana begitu banyak pelayan/pegawai dari berbagai bagian negeri tewas merupakan contoh tragis sebuah peran katastropi. Dengan

sorotan yang mengerikan terhadap kebakaran tersebut, kelemahan dari Undang-undang bangunan serta administrasi telah terungkap. Begitu banyak, Kepentingan tetap terhadap material, konstruksi dan keahlian terpusat pada undang-undang bangunan dimana mereka sulit menyesuaikan dangan temuan-temuan dan perubahan kebutuhan masyarakat.

Fakta bahwa kebanyakan kebakaran terjadi di tempat terpencil, dan mereka yang berada pada dinas bersenjata, memberikan pelaporan yang sangat luas tentang tragedi selama beberapa hari, khususnya ketika banyak korban tetap tinggal di rumah sakit. Satu akibat goncangan katastropi oleh karena tindakan di kota-kota seluruh dunia untuk mengawasi tempat-tempat hiburan umum dan mensurvei, administrasi dan Undang-undang perlindungan kebakaran. Pada skala yang lebih luas, katastropi depresi ekonomi dunia menimbulkan beragam tanggapan melalui tindakan kolektif, dimana terdapat banyak kesamaan meskipun perbedaan-perbedaan ideologis maupun regional di antara berbagai negara dunia, dikarenakan adanya faktor-faktor ekologis yang sama, umumnya pada industri bertenaga modern dan sistem harga.

Perang dunia menggambarkan tingkatan dimana daerah tindakan kolektif yang luas perlu disesuaikan dengan kondisi perang total modern dan sama-sama menggambarkan pandangan kebiasaan lama yang kuat secara dekat, ketika desakan untuk merubah kendali muncul, dan para pejabat tetap mempertanggungjawabkan keputusasaan yang sekaligus lahir sebagai sumbangan patriotik. Kebijaksanaan dan tentunya bahwa masyarakat telah begitu analitik terhadap masalah dan kebutuhan-kebutuhannya, dan telah begitu

siap untuk mengantisipasi katastropi yang mungkin akan datang dengan rencana pelaksanaan program perbaikan, bahwa setelah tragedi banyak menimbulkan korban dengan menanganinya dari batas kemauan manusia sebagai tambahan sejumlah kemajuan baru yang tangible (fisik) alam peralatan hidup masyarakat. Saya telah melihat masyarakat dimana karena mereka telah melengkapi dirinya dengan personil yang mampu berfikir segar, yang ditimbulkan dari fasilitas rekreasi program kerja pemulihan depresi sebagai fasilitas pertama mereka.

Pendekatan seperti ini bagi kajian kita terhadap a.n adalah sulit, sehingga menimbulkan tuntutan-tuntutan kepada kekuatan kita untuk mengamati, kesadaran yang peka terhadap perubahan serta ketidakmampuan menyesuaikan diri dan terhadap keinginan kita berhadapan dengan politik, yakni rumah tangga pemerintah—dasar -dasar administrasi. Faktor-faktor ini anda boleh memperbaiki pada pilihan saya—dalam beragam kombinasi yang berada di belakang badan pemerintah. Dalam kombinasi tersebut akan dijumpai alasan-alasan akan keberadaannya, demikian pula alasan-alasan yang menentangnya. Hanya sejauh ini kita dapat menemukan sejumlah inti utama pemerintah dalam kombinasi dan mengharapkan sebuah badan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Proses pertumbuhan dan perumusan sebuah kebijakan pemerintah di luar materi-materi lingkungan ini. Kita mungkin terlalu tanggap untuk berubah, atau kita mungkin gagal mencapai yang terbaik dangan mangabaikan apa yang mungkin kita perbuat untuk menguntungkan kita sendiri melalui tindakan bersama, jika kita melaksanakan tugas politik ini secara tidak baik.

Ketika saya membayar pajak, tulis Justice Holmes kepada temannya, Sir Frederick Pollock, saya membeli peradaban. Tidak ada tugas kemasyarakatan yang mudah di dunia yang komplikatif ini untuk mendapatkan nilai yang pas dengan apa yang kita beli. Tugas itu merupakan satu temuan sebab-sebab parmasalahan, komunikasi mengenai obat-obatan yang mungkin, pengorganisasian masyarakat, perumusan hukum. Ini merupakan tugas, secara singkat, politik. Tugas akan menjadi lebih bermanfaat diselenggarakan jika masyarakat, berikut badan-badan dalam dinas pemerintah, memahami ekologi pemerintah.[]

BAB II

HUBUNGAN EKOLOGI ADMINISTRASI DENGAN MANAJEMEN STRATEGIS

A. Manajemen Strategis

Dalam setiap organisasi *(corporate),* proses manajemen strategis meliputi aktivitas yang berlangsung terus-menerus dengan pola aktivitas bersifat siklus, dari kegiatan analisis lingkungan sampai kepada kegiatan mengevaluasi dan mengawasi. Kelompok manajemen strategis menganalisis lingkungan eksternal (peluang dan tantangan organisasi) dan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan organisasi). Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, serta peluang-peluang dan tantangan yang senantiasa dihadapi oleh setiap organisasi dianalisis dengan pendekatan analisis S.W.O.T. Setelah faktor-faktor strategis diidentifikasi, kelempok manajemen strategis mengevaluasi hubungan dan menentukan misi organisasi.

Tahap pertama, formulasi strategis adalah suatu pernyataan dari misi, tujuan-tujuan, strategis-strategis, dan kebijakan-kebijakan organisasi. Implementasi strategis organisasi merupakan proses program-program, anggaran-anggaran, dan prosedur-prosedur.

Terakhir, evaluasi dan kontrol kegiatan sebagai umpan balik aktivitas organisasi. Suatu model manajemen strategis sebagai suatu proses yang terus menerus dapat diilustrasikan pada gambar 2.1:

Gambar 2.1.
Model Proses Manajemen Strategis dari Sufian
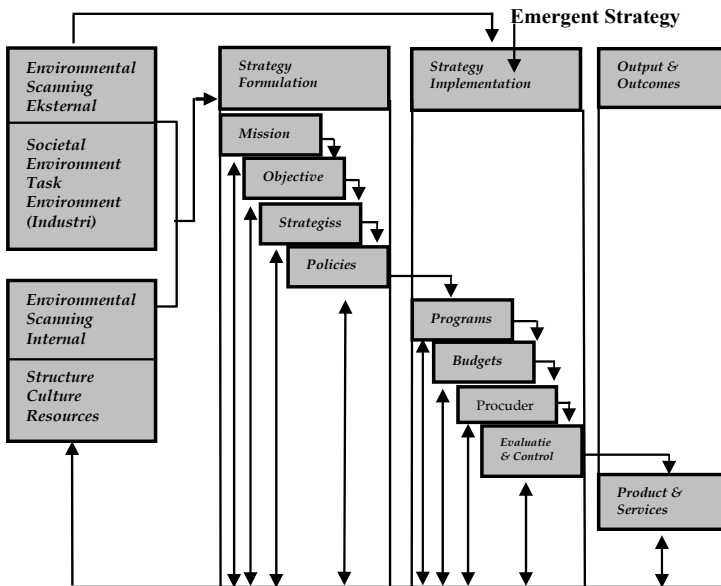
Sumber: *Sufian (Disertasi, 2002)*

B. Lingkungan Organisasi Publik

Setiap organisasi dapat membuat banyak keputusan strategis, tetapi umumnya hanya membuat satu rencana strategis. Rencana strategis itu menyeluruh, berjangka waktu tertentu yang dijabarkan dalam angka-angka waktu dan biaya, semuanya dalam uraian yang

panjang. Ia mencakup semua kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan visi dan misi organisasi.

Perencanaan, termasuk juga perencanaan strategis, adalah suatu proses. Sebagai suatu proses, perencanaan strategis berlangsung terus, sementara keputusan-keputusan biasa dibuat lagi dengan bertolak dari rencana-rencana tersebut. Keputusan strategis, sekali dibuat selesai. Sedangkan perencanaan strategis, sekali disusun, ia berkelanjutan. Implementasi dari suatu keputusan strategis ditentukan oleh rencana operasional, program, anggaran, dan prosedur yang menyusul keputusan itu. Suatu gambaran hubungan ekologi administrasi dengan manajemen strategis dalam perencanaan pembangunan. Berikut ini diuraikan contoh lingkungan publik pembangunan perdesaan.

Environmental Scanning, terdiri dari analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal ditujukan pada variabel (*Strengths dan Weaknesses Organization)* terdiri dari dimensi : analisis potensi alam, analisis potensi masyarakat, analisis keadaan pemerintahan desa, analisis sumber pendapatan Desa, dan analisis kebutuhan masyarakat. Sedangkan analisis lingkungan eksternal ditujukan pada variabel-variabel *(Opportunities dan Threats Organization)* terdiri dari dimensi: analisis kebijakan Pemerintah, analisis kebutuhan pasar dari sumber perdesaan, analisis perkembangan teknologi, dan analisis investasi Pemerintah dan swasta nasional. Variabel-varibel lingkungan internal dan lingkungan eksternal perdesaan tersebut tertuang pada gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Contoh Variabel-variabel Lingkungan Publik Perdesaan
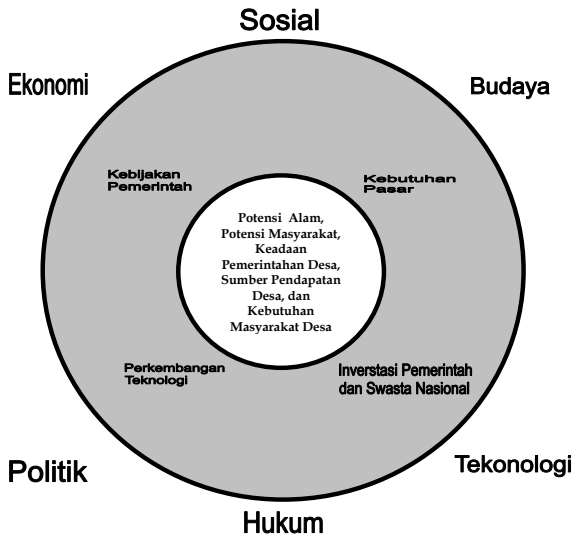
Sumber: *Modifikasi dari Hunger dan Wheelen (1996:11)*

Sebagaimana telah dikemukakan pada gambar 2.2 bahwa salah satu aspek yang penting dalam manajemen strategis adalah faktor lingkungan, yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan organisasi. Lingkungan adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan organisasi yang dapat menimbulkan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan yang berubah-ubah, manajemen strategis harus mampu melakukan analisis dan diagnosis yang cermat tentang lingkungannya, lingkungan yang sekarang maupun perkiraan lingkungan di masa yang akan

datang, sehingga dapat ditentukan peluang-peluang dan tantangan-tantangannya.

Lingkungan eksternal ditandai dengan karakteristik tidak memiliki batas, dalam arti meskipun terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, dan hukum, akan tetapi rincian masing-masing lingkungan amat luas, dalam dan tanpa batas. Masing-masingnya memiliki intensitas pengaruh yang berbeda terhadap berbagai aspek manajemen fungsional.

Di samping itu, lingkungan eksternal hanya memberikan tanda yang lemah kepada manajemen, dalam arti jarang ditemukan tanda perubahan yang transparan. Kecendrungan perubahan biasanya dapat dilihat dalam jangka panjang dan malah sering bertolak belakang satu sama lain yang dapat menyulitkan pemilahan. Menurut Suwarsono (1994 : 24) lingkungan eksternal memiliki sifat tidak dapat dikendalikan, sehingga manajemen sama sekali tidak memiliki kendali manajerial terhadap besaran arah perubahan lingkungan eksternal. Akibatnya manajemen tidak dapat sepenuhnya bersikap proaktif.

Dalam menganalisis lingkungan internal dan eksternal dapat digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan tidak reguler, pendekatan reguler dan kontinyu (Suwarsono, 1994 : 25-26). Pendekatan tidak reguler menurut Suwarsono (1994 : 25) merupakan pendekatan dadakan atau ad-hoc, artinya analisis dibuat bila ada peristiwa tertentu yang diperkirakan mempengaruhi prospek organisasi. Pendekatan reguler dilakukan sebagai upaya secara periodik memperbaharui dan melengkapi sejumlah variabel lingkungan internal dan eksternal. Dengan pendekatan ini organisasi

secara berkala memperoleh informasi terdini pada pokok-pokok persoalan tertentu, oleh karena itu manajemen dapat menyiapkan antisipasi secara reguler.

Pendekatan kontinyu berusaha melakukan analisis terhadap banyak variabel dari lingkungan internal dan eksternal, yang digunakan sebagai masukan penyusunan rencana yang menyeluruh, sehingga bagi para pimpinan pengumpulan dan analisis data lingkungan internal dan eksternal menjadi hal yang rutin dan terus menerus.

Dengan demikian, analisis lingkungan internal dan eksternal dari ketiga pendekatan ini dapat dilakukan melalui empat tahapan yaitu :

a. Identifikasi dan seleksi sejumlah variabel dan indikator dari lingkungan internal dan eksternal yang relevan dan secara signifikan dianggap berpengaruh pada prospek organisasi.
b. Manajemen berusaha mengetahui karakter masing-masing indikator yang telah terseleksi dan menemukan berbagai dugaan penyebab kemunculan indikator yang berkaitan antar indikator, serta memperkirakan eksistensi masing-masing indikator dimasa yang akan datang.
c. Manajemen berusaha mengetahui implikasi manajerial, langsung maupun tidak langsung, yang dapat dan mungkin ditimbulkan oleh masing-masing indikator dan atau

kombinasi antar indikator. Implikasi tersebut kemudian dikaitkan dengan berbagai manajemen fungsional yang telah dikenal untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

d. Manajemen berusaha merumuskan berbagai anitisipasi strategi, yaitu menyiapkan berbagai kemungkinan tanggapan yang diperlukan.

C. Lingkungan Organisasi Bisnis

Environmental Scanning Business Organization, terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal ditujukan pada variabel-variabel (***Opportunities*** dan ***Threats Organization***) terdiri dari dua bagian: ***task environment*** (***industry***) dan ***societal environment.*** Beberapa elemen dari ***task environment*** yaitu: ***shareholders, governments, suppliers, local communities, competitors, customers, creditors, labor unions, special interest groups, dan trade associations***. Beberapa elemen dari ***societal environment*** yaitu: ***economic forces, sociocultural forces, technological forces, dan political-legal forces.*** Sedangkan Analisis lingkungan internal ditujukan pada variabel (***Strengths*** dan ***Weaknesses Organization***) terdiri dari ***organization structure, culture, dan resources.*** Variabel-varibel lingkungan internal dan lingkungan eksternal tersebut tertuang pada gambar 2.3:

Gambar 2.3.

Contoh Variabel-variabel Lingkungan Organisasi Bisnis dari Hunger dan Wheelen
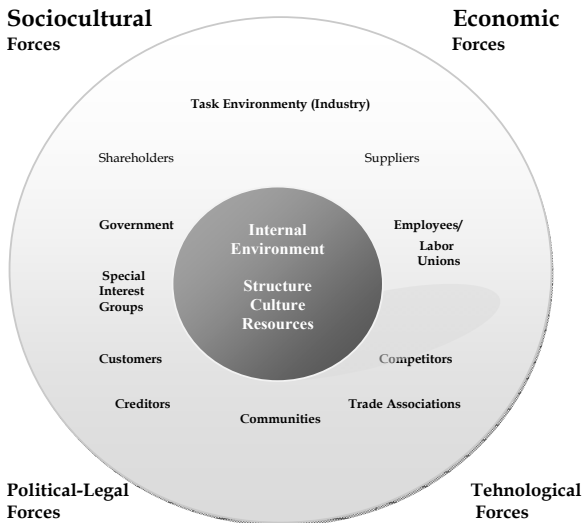
Sumber: *Hunger dan Wheelen (1996)*

Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk dalam organisasi dimana organisasi ini hidup. Lingkungan eksternal terdiri dari dua

bagian: lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Beberapa elemen tersebut adalah pemegang saham, pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing pelanggan, kreditur, serikat buruh, kelompok kepentingan khusus, dan asosiasi perdagangan. Lingkungan kerja perusahaan sering disebut **industri.** Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum, kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang.

Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Varibel-variabel tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabel-varibel ini meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi. Struktur adalah bagaimana cara perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Struktur sering disebut *rantai perintah* dan digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Budaya adalah pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus memunculkan dan mendefinisikan prilaku yang dapat diterima anggota dan manajemen puncak sampai karyawan

operatif. **Sumber daya** adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Aset itu meliputi keahlian orang, kemampuan, dan bakat majerial, seperti aset keuangan dan fasilitas pabrik dalam wilayah fungsional. Tujuan dalam manajemen strategis adalah memadukan variabel-veriabel internal perusahaan untuk memberikan *kompetensi unik*, yang memampukan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif secara terus-menerus sehingga menghasilkan laba.[]

BAB III

PERILAKU ADMINISTRASI

Untuk memahami perilaku administrasi, maka dapat mengacu pada teori perilaku manusia dalam lingkungan organisasi administrasi. Bicara tentang perilaku manusia dalam lingkungan organisasi administrasi tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Pada dasarnya, perilaku manusia merupakan fungsi interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Berdasarkan ilmu pengetahuan sosial, manusia dalam pergaulan hidupnya tidak dapat melepaskan dirinya dari karakteristik pribadi, latar belakang pribadi dan pengalaman masa lalu.

Karakteristik pribadi manusia dibentuk dari nilai agama, etnis dan tradisi. Nilai agama sangat besar pengaruhnya pada kepribadian manusia. Manusia tidak bisa menjalani kehidupan yang lebih baik atau mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan peradaban manusia, tanpa memiliki keyakinan terhadap ajaran agama. Muthanhari (1992:86) menyatakan, bahwa keyakinan beragama dapat menciptakan kebahagiaan, kegembiraan

dan memperbaiki hubungan sosial manusia. Bahkan Soekanto (1991:207) mengatakan, berbagai agama dan mazhab-mazhab dalam agama melahirkan pula kepribadian yang berbeda-beda dari umat manusia. Untuk memperoleh pengetahuan agama, manusia mendapatkannya di lingkungan keluarga dan sekolah, dan bahkan dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Salvatore (dalam Gibson, 1992:63) bahwa etnis dapat pula mempengaruhi kepribadian manusia, kecenderungan dan perangai sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan, faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan. Siagian (1991:54) berpendapat, faktor keturunan ini adalah segala hal yang oleh seseorang dibawa sejak lahir dan bahkan merupakan warisan dari kedua orang tuanya, misalnya sifat marah dan kecerdasan.

Etnis yang berbeda, dapat pula menimbulkan karakteristik yang berbeda masing-masing orang. Melayu misalnya, sebagian orang masih menganggap mempunyai sifat malas bekerja, atau orang Cina dapat dianggap mempunyai sifat rajin bekerja atau ulet dalam berusaha. Sejalan dengan pendapat diatas Uchjana (1986:54) menyatakan, sifat tabiat manusia yakni pembawan manusia sejak manusia dilahirkan merupakan warisan dari kedua orang tuanya *(heredity)* dan dari nenek moyangnya.

Selain nilai agama dan etnis, karakteristik manusia dapat pula dipengaruhi oleh kebudayaan dan tradisi mereka. Sehingga tutur kata dan cara berinteraksi (bergaul) diantara individu kelihatan corak dan perbedaan. Soekanto (1991 : 204) menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat, akan dijumpai suatu proses, seorang anggota masyarakat yang baru (seorang bayi) kan mempelajari norma-

norma dan kebudayaan masyarakat diamana ia menjadi anggota *(processocialization).* Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia, demikian pula nilai-nilai tradisi dapat mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau berhubungan dengan orang lain. Manusia tumbuh dewasa dalam suatu budaya, yang merupakan lingkungan kepercayaan, adat istiadat, pengetahuan dan praktek yang diciptakan manusia sebagai suatu tradisi. Budaya adalah perilaku konvensional masyarakatnya, dan budaya mempengaruhi semua tindakan, meskipun sebagian besar tidak disadarinya. Davis (1992:46) berpendapat bahwa orang-orang belajar untuk bergantung pada budanya. Budaya memberikan stabilitas dan jaminan bagi mereka, karena dapat memahami hal-hal yang sedang terjadi dalam masyarakat dan mengetahui cara menanggapinya.

Dari beberapa pendapat tersebut, merupakan alasan yang kuat menjelaskan bahwa masalah perilaku organisasi tidak terlepas dari karakteristik pribadi manusia didalamnya yang dibentuk oleh nilai agama, etnis, dan budaya/ tradisi yang membentuk perilaku untuk berbuat atau bertindak dalam kehidupan dan pekerjaan selaku aparat pemerintah.

Latar belakang pribadi manusia dapat dibentuk dri nilai-nilai agama dan etnis. Selain itu dapat pula dipengaruhi lingkungan dan pendidikan. Yang dimaksud dengn lingkungan adalah siatuasi dan kondisi yang dihadapi oleh seseorang pada usia muda dalam rumah, disekolah dan lingkungan masyarakat dekat yang dilihat dan dihadapinya sehari-hari. (Siagian, 1991:54-57) menyatakan,

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang berlangsung seumur hidup dalam rangka mengalihkan pengetahuan oleh seseorang kepada orang lain yang bersifat formal dan informal.

Para ahli telah yakin bahwa perilaku seseorang setelah dewasa banyak dipengaruhi oleh kondisi di rumah. Jika seseorang dibesarkan dalam rumah tangga yang bahagia, pola perilaku seseorang akan bersifat "baik", misalnya : peramah. Sebaliknya, keluarga yang miskin orang tuanya sering bertengkar atau karena keluarga yang kurang melaksanakan nili-nilai agama, maka sukar diharapkan orang tersebut menumbuhkan kepribadian yang positif. Misalnya : orang itu akan bersifat egois begitu besarnya peranan keluarga, (Gerungan, 1991 : 180-181) menyatakan "didalam lingkungan keluarga manusia pertama-tama belajar memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar bekerja sama, bantu membantu, dengan kata lain manusia pertama-tama memegang peranan sebagai mahluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan-kecakapan tertentu dalam pergaulannya dengan orang lain.

Pendidikan dapat pula mempengaruhi perilaku individu. Pendidikan yang bersifat formal dapat ditempuh dari tingkat taman kanak-kanak hingga (bagi sebagian orang) perguruan tinggi. Dipihak lain, pendidikan yng sifatnya non formal dapat terjalin dimana saja. Dalam pada itu kiranya disadari pula bahwa sasaran pendidikan saja. Salah satu bagian yang teramat penting dari upaya pendidikan adalah pembinaan watak, termasuk pendidikan agama.

Pengalaman masa lalu juga berpengaruh terhadap kepribadian manusia. Siagian (1991:660) menyatakan, yang dimaksud dengan

pengalaman masa lalu adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa yang dilaluinya dalam perjalanan hidupnya.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pengalaman seseorang sejak kecil turut membentuk perilaku yang bersangkutan. Misalnya, apabila seseorang pada waktu kecil mengalami suatu peristiwa pahit seperti hidup dalam keluarga yang tidak bahagia, maka tidak mengherankan apabila setelah dewasa orang tersebut akan menunjukkan sikap keras, agresif dan sebagainya. Sebaiknya apabila dalam masa kecilnya terjadi peristiwa-peristiwa yang manis, pengalaman yang demikian akan membentuk pola perilaku yang positif. Sesungguhnya amat penting mendapat perhatian dalam hubungan ini adalah kemampuan seseorang untuk berlajar dari pengalamannya, apakah pengalaman itu pahit atau manis. Pengalaman seseorang disekolah, dalam pergaulan sehari-hari diluar rumah dan diluar sekolah, pengalaman dalam pergaulan sosial, pengalaman dalam biudang keagamaan dan peristiwa yang mungkin pernahdialaminya pada organisasi lain pun akan turut membentuk pola perilaku seseorang.

Sejalan dengan uraian diatas, Paul Hersey dan Ken Blachard (1992:27) menyatakan, bahwa harapan dan keinginanan adalah persepsi atas kemungkinan pemenuhan kebutuhan tertentu dari seseorang berdasarkan pengalaman masa lampau. Pengalaman boleh aktual atau berasal dari orang lain. Pengalaman yang tidak dialami sendiri berasal dari sumber-sumber yang dipandang sah, seperti orang tua, kelompok sekerja, guru, buku-buku atau majalah berkala, jurnal dan media ilmiah lainnya.

Setelah diuraikan ada tiga komponen pokok yang mempengaruhi perilaku manusia yang dibawanya kedalam organisasi. Dilain pihak organisasi dipengaruhi pula oleh tiga komponen yaitu : Keadaan lingkungan, teknolgi/ kemampuan, dan strategi.

Keadaan lingkungan sangat mempengaruhi organisasi. Yang dimaksud lingkungan terutama sistem sosial, termasuk bagian-bagiannya seperti, ideologi, sistem politik, sisyem ekonomi, sistem sosial budaya, sistem hukum, sistem pertahanan dan kemanan dan sistem agama. Selain itu juga lingkungan alam (fisik) dan sosial akan memberikan fungsi-fungsinya kepada manusia.

Siagian (1991:30-31) berpendapat, yang dimaksud lingkungan adalah totalitas keadaan dan faktor yang mempunyai dampak tertentu terhadap manusia. komponen lingkungan itu terdiri dari : Faktor ekonomi, sosial, fisik, politik dan teknologi.

Semua organisasi beroperasi dalam lingkungan luar. Organisasi tidak berdiri sindiri. Suatu organisasi tidak dapat menghindar dari pengaruh luar. Lingkungan luar mempengaruhi proses dan manajemen organisasi. Oleh sebab itu, lingkungan luar harus dipertimbangkan untuk menelaah perkembangan organisasi.

Teknologi dan kemampuan menyediakan sumber daya yang digunakan orang untuk bekerja dan sumber daya itu mempengaruhi tugas yang manusia lakukan berorganisasi. Orgainisasi tidak dapat menghasilkan banyak hal tanpa perlatan yang lengkap dan canggih. Teknologi yang tinggi berguna bagi sarana yang memungkinkan manusia melakukan lebih banyak pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik. Begitu besarnya pengaruh teknologi pada manusia dan

organisasi, sehingga akhirnya dapat berakibat positif dan negatif. Davis (1992:17) menyatakan bahwa laju perkembangan yang tidak berubah selama manusia bekerja, teknologi tidak merusak pekerjaan selama-lamanya, tetapi teknologi memang menciptakan berbagai pekerjaan yang sering kali tidak dapat dilakukan manusia dengan baik, karena manusia belum siap untuk memakainya. Oleh karena itu teknologi menimbulkan rasa tidak aman, stres, kecemasan dan sikap yang ugal-ugalan.

Strategi juga dapat memberikan pengaruh pada tindakan manusia. Yang dimaksud dengan strategi adalah peta perjalanan yang menunjukkan arah yang seyogyanya ditempuh oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya dan juga senafas dengan palsafah yang dijadikan landasan hidup dalam berorganisasi.

Dengan demikin strategi merupakan salah satu alat bagi organisasi. Setiap organisasi melakukan kebijaksanaan melakukan usaha untuk menghadpi masalah, tantangan, gangguan ancaman, dan hambatan yang timbul serta semakin mampu memanfaatkan berbagai kesempatan yang tersedia.

Dengan demikian akhirnya manusia dan organisasi dalam keadaan saling berhadapan. Apabila manusia membawa karakteristik pribadi, latar belakang pribadi dan pengalaman masa lalu kedalam tatanan organisasi. Organisasi yang juga merupakan lingkungan bagi manusia (pegawai) telah menerima pula pengaruh dari keadaan lingkungan, teknologi/kemampuan dan strategi. Ini berarti bahwa manusia dengan lingkungannya yaitu organisasi menentukan perilaku keduanya secara langsung. Implikasi kedalam

diri manusia, organisasi memberikan jawaban (response) terhadap stimulus yang timbul. Apabila pencerminan komponen-komponen yang mempengaruhi perilaku manusia dalam lingkungan keorganisasian berinteraksi dengan pencerminan komponen-komponen yang mempengaruhi organisasi, maka akan terwujudlah perilaku individu dan kelompok dalam organisasi pemerintah yang merupakan perilaku administrasi.

Gambar 3.1.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku administrasi
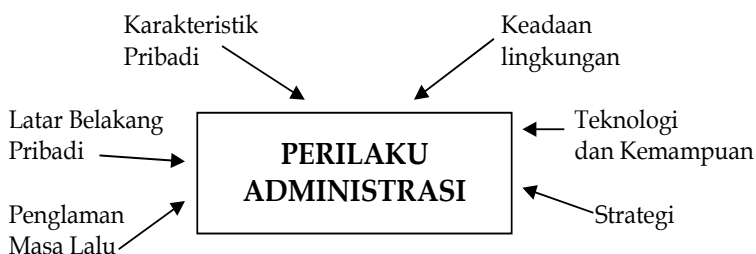
BAB IV

DIMENSI-DIMENSI EKOLOGI ADMINISTRASI

Dalam menganalisa ekologi Administrasi dipergunakan perincian faktor-faktor ekologis seperti pada gambar 3.1, dikaitkan dengan model sistem dan model keseimbangan (equilibrium model) dari F.W Riggs, meliputi faktor-faktor ekologis tang bersifat alamiah dan bersifat sosial (kemasyarakatan) khususnya berkaitan dengan sistem pemerintahan/administrasi negara, yang meliputi :

A. Faktor Perubahan Sosial

Kehidupan manusia merupakan suatu proses dari satu tahap hidup ke tahap lainnya, karena itu perubahan sebagai proses dapat menunjukkan perubahan sosial dan perubahan budaya, atau berlaku kedua-duanya pada suatu runtutan proses itu.

Menurut Astrid (dalam Garna, 1992:6) perubahan sosial ialah perubahan masyarakat dalam arti luas, diartikan sebagai perubahan/ perkebangan dalam arti positif maupun negatif. Lebih lanjut Garna menambahkan bahwa arti perubahan sosial mempunyai dua

dimensi, yaitu perubahan sosial sebagai kemunduran (regress) dan sebagai kemajuan (progress).

Dalam perkembangannya di Indonesia, sekurang-kurangnya ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu : sosiologi, politik, ekonomi, budaya dan keamanan. Dalam pembahasan lebih lanjut faktor ideologi tidak lagi dibicarakan disini. Sedangkan faktor perubahan sosial yang lain akan dibahas satu persatu dibawah ini.

1. Faktor Sosial

Sebelum membahas faktor politik terhadap pemerintahan/ administrasi negara terlebih dahulu perlu dijelaskan arti politik. Secara etimologis politik berasal dri bahasa Yunani “Polis” yang artinya kira-kira sama dengan kota *(city)* atau negara kota *(city state).* Dari kata polis tadi timbul istilah lain yaitu polite artinya warga negara, politikos artinya kewarga negaraan, politike techne artinya kemahiran politik dan selanjutnya orang-orang Romawi mengambil istilah tersebut dan menamakan pengetahuan tentang negara itu sebagai arspolitica (kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan). Dengan demikian jelaslah bahwa poitik adalah suatu istilah yang bersangkut paut dengan soal-soal Negara dengan Pemerintahannya. Jadi pada hakekatnya politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan *(power),* teknik menjalankan kekuasaan atau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol atas kekuasan.

Sebagai fungsi, politik merupakan usaha-usaha perumusan kehendak/ kemauan dari pada Negara (*the formulation of the*

will of the state). Dengan demikian politik itu bersangkut paut dengan pemerintahan dan kekuasaan. Sebaliknya sebagai fungsi, pemerintahan merupakan usaha-usaha melaksanakan kehendak dari pada negara (*the execution of the will othe state*). Jadi dapat disimpulkan bahwa politik dan pemerintahan sangat erat berkaitan. Politik merupakan pangkal otak dari pemerintahan/ administrasi negara, dan pemerintahan/ administrasi negara merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam meninjau pengaruh politik terhadap pemerintahan/ administrasi negara perlu diperhatikan sistem politik, yaitu sistem hubungan kekuasaan dalam pemerintahan dan hubungan kekuasaan dengan pemerintah dan sumbernya (rakyat). Dengan demikian sistem poltik mencakup hubungan antara pengemban kekuasaan pemerintah dengan wakil-wakil rakyat dalam badan perwakilan, bagaimana rakyat diorganisir untuk dapat mengefektifkan kekuasannya, sistem pemilihan dan lain-lain.

Selama pemerintahan Orde Baru dibawah UUD 1945, sistem pemerintahan/ administrasi negara mengalami peningkatan dan diharapkan mampu mencapai tingkat *public service neutrality* dalam arti hanya mengabdi kepada Pemerintah Negara Kesatuan R.I. Bersamaan dengan itu pula menjadi berkurang pengaruh dari partai-partai politik yang bersifat negatif seperti pada masa-masa yang lampau. Oleh karena pendukung utama Pemerintahan Orde Baru adalah Golkar, adalah sewajarnya KORPRI, sebagai pegawai-pegawai penggerak utama pemerintahan/administrasi negara, mempunyai persamaan sikap dan pandangan mengenai masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan. Yang menjadi masalah

bagaimana kontrol oleh rakyat terhadap pemerintahan/administrasi negara dapat efektif, sehingga dapat dicegah bergesernya pemerintahan/administrasi negara dari "*the servant of the public*" kearah "*the master of the public*" berhubung karena tidak adanya kontrol yang efektif.

2. Faktor Sosial Ekonomi

Berdasarkan ketentuan pasal 33 UUD '45 dasar perekonomian Indonesia ada usaha-usaha pemerintah, usaha-usaha koperasi dan usaha-usaha swasta. Dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ekonomi Indonesia didasarkan pada keseimbangan antara sektor pemerintah, swasta dan koperasi.

Beberapa pengaruh faktor ekonomi terhadap pemerintahan/ administrasi negara, antara lain :

a. Ekonomi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang telah terjabar dalam pasal 33 UUD 45. Landasan ekonomi ini mempunyai dmpak terhadap pemerintah, yaitu dalam rangka mewujudkan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan atau usaha koperasi, maka pemerintah sejak semula telah mempersiapkan langkah-langkah untuk pembinan koperasi.

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pengejawantahan dari hal ini adalah perwujudan perusahaan-perusahaan negara atau "*public enterprises*" yang berada dibawah berbagai departemen.

c. Dalam ekonomi Indonesia terbuka kesempatan yang luas bagi swasta untuk berusaha, juga dibidang penanaman modal, demikian pula halnya swasta asing mendapat kesempatan hanya dengan bimbingan dan pengendalian dari pihak pemerintah. Mialnya untuk mengatur distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok agar mereka supaya merata ke segala lapisan masyarakat, untuk mengendalikan harga , dll.
d. Ekonomi kita sedang berkembang dan belum mampu menciptakan taraf hidup rakyat yang tinggi. Keadaan demikian belum memungkinkan pemerintah memungut pajak, cukai dan lalin-lain yang cukup tinggi untuk membiayai operasi pemerintahan/administrasi negara baik untuk peralatannya maupun gaji pegawai.
e. Pada umumnya gaji pegawai belum dapat mendatangkan kehidupan yang layak pada pegawai (public servant).
f. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berencana diperlukan suatu badan perencana yang dilengkapi dengan seperangkat pemerintahan/ administrasi negara.
g. Dalam rangka pembangunan nasional diperlukan investasi (penanaman) modal yang cukup besar , baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Dalam hal itu pengaruh pemerintah terhadap ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan APBN;
2. Dalam kebijakan penenaman modal;
3. Dalam kebijakan proteksi;
4. Dalam kebijakan di bidang ekspor.

3. Faktor Sosial Budaya

Sosial budaya adalah kata majemuk tersusun dari kata sosial dan budaya. Kata sosial menyangkut suatu kehidupan bersama manusia. Dengan demikian kata sosial menyangkut kelompok-kelompok manusia bagaimana susunan kelompok perpindahan kelompok dari dan ke kelompok lain, dasar penyusunan kelompok dan lain-lain. Dengan budaya bersangkut paut dengan segala macam karya manusia yang bersumber pada cipta, rasa, dan karsa yang berwujud berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai seni dan keindahan serta berbagai macam ukuran etika, moral dan sebagainya. Pengaruh sosial budaya terhadap pemerintahan/administrasi negara, dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

a. Negara Indonesia tergolong negara yang sedang berkembang dimana masyarakatnya menglami masa transisi dari masyarakat tradisonal menuju masyarakat modern (maju). Apabila dihubugkan dengan model F.W. Riggs, maka masyarakat Indonesia dapat dimasukkan kedalam "*prismatic society*" dengan ciri heterogen, tumpang tindih dan formalitas.

b. Proses modernisasi bersamaan degan perkembangan teknologi sosial dan pisik. Teknologi sendiri diartikan sebagai pengetahuan untuk memanfaatkan daya cipta manusia dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Teknologi pisik meliputi penemuan ilmiah dan teknik yang biasanya menghasilkan alat-alat. Sedangkan teknologi sosial meliputi penemuan dibidang sosial yaitu yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat, termasuk organisasi dan asosiasi manusia. Misalnya organisasi buruh.

c. Tumbuh dan berkembangnya komunikasi terutama dibidang alat-alat komunikasi jarak jauh yang menembus daerah-daerah di Indonesia (satelit Palapa, Intersat dan alat komunikasi lainnya) yang memungkinkan mempercepat proses pemerintahan/administrasi negara.

Sedangkan pemerintahan/administrasi negara terhadap sosial budaya dapat ditelusuri dari program-program pembangunan sosial budaya yang digerakkan oleh pemerintah. Dalam GBHN pemerintah telah memprogramkan dan mengarahkan program pembangunan dibidang sosial budaya. Beberapa pengaruh yang dimaksud adalah:

a. Program Modernisasi Desa

Program modernisasi desa dilaksanakan sementara oleh pemerintah daerah yang telah mengubah pola berpikir, sikap dan perilaku penduduk pedesaan. Dan juga program-program pengentasan kemiskinan untuk desa tertinggal.

b. Program-Program di Bidang Seni Budaya

Program ini telah mengembangkan seni dan budaya nasional terutama program-program yang dilancarkan oleh Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Program di Bidang Pendidikan

Pembangunan di bidang ini di implementasikan oleh pemerintah yang telah membuka kesempatan seluasnya bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan.

d. Program di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Program dibidang kesehatan yang menghasilkan pusat pelayanan kesehatan (PUSKESMAS) telah mengubah tingkat kesehatan penduduk, yang pada gilirannya akan menekan tingkat kematian.

e. Program di Bidang Lainnya

Berbagai departemen pemerintah telah melaksanakan usaha-usaha yang dapat mempengaruhi faktor sosial budaya misalnya proyek PERUMNAS oleh Menteri Perumahan Rakyat, peningkatan pelayanan sosial oleh Departemen Sosial).

4. Faktor Sosial Sekuriti (pertahanan dan keamanan)

Militer di Indonesia mempunyai kedudukan, peranan dan fungsi yang khas, sesuai dengan jiwa dan semangat pengabdiannya, yaitu mempunyai fungsi ganda atau dwi fungsi = sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial. Fungsi militer

sebagai kekuatan sosial diwujudkan dalam kekaryaan ABRI, yaitu pelaksanaan tugas-tugas oleh ABRI diluar pertahanan dan keamanan dalam rangka perjuangan Nasiopnal untuk mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan UUD 45.

Sebagai kekuatan sosial, jiwa dan semangat pengabdian ABRI mendorongnya untuk bekerja sama dengan kekuatan lainnya, baha membahu dan saling membantu dalam mewujudkan tujuan nasional. Pernan militer (ABRI) sebagai kekuatan sosial meliputi: ikut menentukan haluan Negara, bertindak sebagai pelopor, stabilisator, ikut serta dalam pembangunan Nasional. Dengan demikian dpat diciptakan suasana hubungan kerjasama yang harmonis diantara sesama kekuatan-kekuatan sosial. Hal ini memperkokoh intergritas bangsa, yang siap menunaikan tugas-tugas pembangunan disamping selalu siap juga dalam menghadapi bahaya dari dalam dan dari luar.

Pengaruh militer terhadap pemerintahan/ administrasi negara dapat ditelusuri melalui dwi fungsi ABRI dengan sistem kekaryaannya, dimana para karyawan ABRI ditugaskan diluar Departemen HANKAM untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga-lembaga dimana mereka ditugaskan. Dengan sendirinya sistem dan prosedur afdministrasi militer, demikian juga praktek-praktek dan kebiasan administrasi militer sampai tingkat tertentu mewarnai sistem dan prosedur serta praktek-praktek dan kebiasaan administrasi lembaga-lembaga tadi. Misalnya :

a. Pemantapan prinsip-prinsip organisasi, diantaranya berdasarkan prinsip lini dan staf.

b. Tata upacara, pakaian seragam, tanda-tanda/ lambang-lambang, singkatan-singkatan dan penegakan disiplin.

Di samping itu adanya pengaruh timbal balik antara pemerintahan/administrasi negara terhadap HANKAM, dapat ditinjau dari dua segia yaitu :

a. Karena anggota militer sewaktu-waktu harus siap bertugas diluar jajaran Departemen HANKAM, maka diperlukan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan persayaratan jabatan yang dimaksud. Oleh karenanya militer perlu diberikan pendidikan tambahan, diharapkan memiliki kemampuan mengemban tugas diluar HANKAM.
b. Pelaksanaan SISHANKAMRATA, memerlukan pengarahan kekuatan rakyat, rakyat perlu dilatih dan diorganisir dalam kelompok yang sewaktu-waktu dapat digerakkan untuk menghadapi tugas HANKAMRATA.

B. Pengaruh Globalisasi

Sistem pemerintah dan kedudukan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik, ekonomi dan keamanan internasional. Bangsa yang ingin, maju tidak dapat membiarkan begitu saja pengaruh internasional. Pemerintah dan seluruh rakyat bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional yang begitu cepat berubah dan sulit diramalkan, dengan cara menyaring semua pengaruh globalisasi dan mengambil yang bermanfaat untuk disesuaikan dengan sistem dan budaya kita.

Pengaruh globalisasi yang dimaksud dapat ditinjau dari minimal tiga bidang yakni politik, ekonomi dan ketahanan keamanan.

Pengaruh global dibidang politik, berawal dari pendidikan politik yang menerminkan kepercayaan diri akan kebenaran ideologi di negara bekas Uni Sovyet dan RRC, sedang mengalami proses pengkajian ulang dan perombakan. Marxisme yang diterapkan di kedua negara besar itu tengah mengalami ujian yang paling berat yang dituntut oleh rakyat, yaitu seberapa sanggup kaidah-kaidah ideologi itu mampu memberikan jawaban terhadap persoalan kebutuhan akan sandang dan pangan bagi bagian terbesar rakyatnya. Angin segar yang dibawah oleh pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, menyebar keseluruh penjuru dunia. Galsnot dan prestroika menjadi buah bibir pembahasan dimana-mana, bahkan menerpa di negara kita. Galsnot dan prestroika menarik perhatian karena keterbukaan dan penataan kembali dunia baru merupakan tuntutan zaman. Gejolak yang terjadi diselang beberapa waktu yang lalu di Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah dan bahkan masih belum terselesaikan sampai sekarang. Bekas negara Yogoslavia merupakan perang multi etnis, pemberontakan FIS di Aljazair sebgai manifestasi ketidak adilan dan kasus di Kamboja sebagai ketidak puasan dan balas dendam antar kelompok, semuanya itu kalau kita tidak berhati-hati akan membawa dampak bagi kehidupan negara kita.

Oleh karena itu, pembinaan politik dalam negeri dan hubungan politik luar negeri bukanlah pekerjaan mudah. Pimpinan politik pada setiap jenjang pemerintahan/administrasi negara harus makin

tanggap mengantisifasi setiap bantuan luar negeri, jangan sampai mempunyai dampak campur tangan urusan dalam negeri. Karena itu pemerintah harus cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan dunia dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa posisi silang bangsa Indonesia mengharuskan kita bersifat terbuka dan percaya diri menghadapi perubahan-perubahan di dunia internasional.

Iklim ekonomi internasional, juga memberi pengaruh terhadap pemerintah. Yang kita harapkan adalah memanfaatkan sebaik-baiknya. Usaha untuk menggalang lebih terpadu, melembaga dan berkesinambungan terhadap kerjasama ekonomi merupakan tuntutan yang tidak kalah mendesaknya. Kita sadar betapa pengaruh perkembangan dan kejadian ekonomi di luar negeri mempengaruhi daya tahan kita didalam negeri. Kemajuan-kemajuan teknologi informasi diberbagai sektor lalu lintas internasional seperti perpindahan modal, kecepatan dalam transaksi pembayaran, gerak investasi dalam memilih keunggulan komparatif antara satu negara dan negara lain, mengubah pengertian aset akibat adanya ekonomi jasa yang telah melunturkan arti dari kedaulatan ekonomi. Gerak naik nilai tukar mata uang negara peminjam bantuan (donor) misalnya menaikkan nilai mata uang Yen dalam sekejap menambah jumlah beban cicilan utang yang harus kita pikul untuk tahun-tahun berikutnya. Semua ini merupakan tantangan berat bagi kita maupun bagi generasi penerus yang akan menangani rangkaian masalah dimasa yang akan datang. Pada hakekatnya, masalah-masalah ekonomi internasional itu tidak terlepas dari keinginan kita untuk meningkatkan daya saing internasional bangsa dalam

menghasilkan sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkn diberbagai pasaran dunia.

Kita harus menyadari dan segera menemukan upaya-upaya supaya dapat bersaing dalam hal menarik investasi dalam konteks memberikan kemudahan kepada investor luar maupun dalam negeri yang ingin menamkan modalnya. Walaupun upaya itu telah dilaksanakan pemerintah dengan membuat kebijakan deregulasi dibidang perizinan dengan dikeluarkannya defakto 23, namun jika kita hendaknya konsekuen melaksanakan kebijakan itu tanpa membuat kesulitan-kesulitan baru. Kebijakan perdagangan bebas perlu kita sambut dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa itu kita tidak mampu besaing dengan negara tingkat ekonominya sudah maju dan mempunyai blok-blok dagang yang sulit ditembus, misalnya MEE. Kebijakan APEC merupakan upaya dan usaha sadar yang perlu kita sambut baik demi terwujudnya tatanan ekonomi dunia baru.

Sebaiknya kita di Daerah Riau ini melalui koordinasi Pemerintah Pusat mengembangkan pembangunan dibidang ekonomi dengan melakukan kebijakan :pertama, studi awal tentang potensi yang ada didaerah dan memilih secara selektif, jenis industri dan produksi pertanian yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi komoditi ekspor yang berdaya saing internasional. Kemudian mengupayakan masuknya inverstor serta alih teknologi. Kedua, mengusulkan zone-zone ekspor serta pengembangan perangkat lunak seperti perundang-undangan, perpajakan dan investasi swasta. Ketiga, implementasi pinjaman dalam bentuk Yen disalurkan melalui *Overseas Economic Cooperation Foundation* (OECF)

untuk membangun pelabuhan, bandara, instalasi listrik dan lain sebgainya. Bantuan dan kerjasama teknik disalurkan melalui *Japan Internasional Cooperation Agency* (JICA) yang bertugas mendirikan pusat-pusat pemilikan ekspor, meningkatkan mutu manjemen lokal, pemasaran, promosi dan jaringan penyaluran. *Japan External Trade Organization* (JETRO) mengembangkan pusat-pusat promosi perdagangan dn industri, sedangkan *Association for Overseas Technical Scholarships* (AOTS) mendatangkan peserta pelatihan ke Jepang. Pembiayan dilakukan melalui berbagai saluran dan lembaga : ASEAN-*Japan Development Fund* yang mencakup *Japan ASEAN Investment Corporation* yang bertugas membeli saham dan obligasi dalam bentuk perusahaan-perusahaan patungan.

Pengaruh global dibidang pertahanan dan keamanan. Kita makin sadar bahwa perpaduan yang harus kita telaah secara cermat adalah interaksi antara konsep geopolitik dan konsep funsionalisme teknologi militer. Paradoks dari kemajuan teknologi militer selama 20 tahun terakhir ialah bahwa pada satu sisi kemajuan itu telah melipat gandakan kemajuan senjata-senjata dahsyat. Dari segi ini tidak satupun kawasan didunia yang bisa melepaskan dirinya sebagai potensi sasaran akibat perang dunia. Setelah bubarnya negara Uni Soviet, pada saat ini kita memasuki era baru dalam perimbangan kekuatan, dimana selain Amerika ada kekuatan lain (Jepang, Rusia dan RRC) akan lebih banyak ikut menetukan corak dan proses perimbangan baru. Disamping itu, ada faktor baru dalam berkembangnya kekuatan Australia dan India di sisi selatan dan barat kita. Semua perkembangan ini harus kita perhatikan karena berkaitan erat dengan pandangan geopolitik kita (garis

imajiner sepanjang lintasan batas luar teritorial Indionesia) maupun pandangan fungsionalisme teknologi (seperti akibat-akibat dari kita membeli pesawat tempur terhadap daya jangkau kemampuan pukul kita). Keamanan dan ketertiban kita telah banyak kita bina yakni atas dasar mengutamakan kemampuan kedalam dan menahan diri. Dalam pada itu, kita harus tetap mengusahakan pengisian secara konkrit konsep ketahanan nasional dan ketahanan regional.

Untuk itu marilah kita perkuat jalinan mata rantai garis belakang dan garis depan kita, dimanapun kita berada dan dilapangan pekerjaan apapun kita berkarya. Kalau kita memang sepakat bahwa kemajuan bangsa ditentukan sedikit banyaknya oleh seberapa pandai bangsa itu mempersiapkan diri dalam meningkatkan daya saing internasionalnya, maka adalah tanggung jawab kita semua untuk terus terang memperjuangkan selisih keunggulan yang makin jelas dibidang politik, ekonomi dan pertahanan keamanan.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu merupakan pengetahuan yang kita geluti sejak taman kanak-kanak sampai pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia, disamping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama.

Manusia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang indah dan mana yang jelek. Secara terus menerus manusia dipaksa harus mengambil pilihan mana jalan yang benar mana jalan yang salah, mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk, dan

apa yang indah dan apa yang jelek. Dalam melakukan pilihan ini manusia berpaling kepada ilmu pengetahuan.

Merupakan kenyataan yang tidak dapat dimungkiri bahwa perdaban manusia sangat berhutang kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi maka pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan lebih cepat dan lebih mudah termasuk dalam kegiatan pemerintahan/administrasi negara, disamping penciptaan berbagai kemudahan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pengangkutan, pemukiman, pendidikan, komunikasi dan pembangunan pada umumnya.

Di pihak lain, perkembangan ilmu pengetahuan sering melupakan faktor manusia, dimana bukan lagi teknologi yang berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan manusia, namun justru sebaliknya, manusialah yang harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Teknologi disini diartikan sebagai penerapan konsep ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah praktis baik yang berupa perangkat keras *(hardware)* maupun perangkat lunak *(software).* Dalam tahap ini ilmu pengetahuan tidak saja bertujuan menjelaskan gejala-gelaja alam untuk tujuan pengertian dan pemahaman, namun lebih jauh lagi, bertujuan memanifulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Berbekal konsep mengenai kaitan antara inefisiensi dengan fungsi-fungsi manajemen maka ilmu pengetahuan mengembangkan teori-teori manajemen untuk penyelenggaraan manajemen pemerintahan/ administrasi negara. Berdasarkan perkembangan pemanfatannya teknologi dapat

menjurus kepada tujuan-tujuan negatif, maka masyarakat termasuk pemerintah harus menentukan teknologi mana saja yang akan dipergunakan dan teknologi mana yang tidak.

Dihadapkan dengan masalah moral dalam menghadap iekses ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditujukan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan.

Teknologi dan kemampuan menyediakan sumber daya yang digunakan orang untuk bekerja dan sumber daya itu mempengaruhi tugas yang manusia lakukan dalam berorganisasi. Organisasi tidak dapat melakukan banyak hal tanpa peralatan yang lengkap dan canggih. Teknologi yang tinggi berguna sebagai sarana yang memungkinkan manusia lebih banyak melakukan pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik.

pemerintahan/administrasi negara memang mempunyai kaitan yang erat dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian sebaliknya ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan pemerintah dalam manajemen pemerintahan/ administrasi negara.

Salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pemerintahan/administrasi negara adalah bagaimana caranya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian kebijaksanaan pemerintah memberi perhatian terhadap prospek masa depan, berdasarkan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perumusan kebijaksanan dengan demikian didasarkan juga atas sumbangan dari ilmu pengetahuan. Kecuali itu, perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat mempengaruhi kwalitas pemerintahan/administrasi negara suatu negara. Antara lain berbagai teknik-teknik dan pendekatan manajemen yang maju dapat dipergunakan dalam pelaksanaan pemerintahan/administrasi negara. Bahkan berbagai peralatan-peralatan baru dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan/administrasi negara.

D. Otoritas dan Power

Menurut penulis, kata "Otoritas" berasal dari kata *"authority"* dapat diartikan sebagai wewenang. Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk meyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan lain perkataan, seseorang yang mempunyai Wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Apabila orang membicarakan tentang wewenang maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya pada hak, bukan pada kekuasaan *(power).* Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasaan tanpa wewenang, merupakan kekuatan yang tidak sah. Kekuasaan *(power)* harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan (legitimasi) dari masyarakat agar menjadi wewenang *(authority).*

Menurut Max Weber Wewenang ada beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. **Wewenang kharismatis,** merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus (wahyu) dan bakat yng dimiliki seseorang. Orang-orang sekitarnya mengakui adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan, karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut adalah sesuatu yang berada diatas kekuasaan dan kemampuan manusia pada umumnya. Wewenang kharismatis akan dapat bertahan selama dapat dibuktikan keampuhannya bagi seluruh masyarakat;
2. **Wewenang tradisional,** dapat dipunyai seseorang atau sekelompok orang. Wewenang yang dipunyai bukan karena mempunyai kemampuan khusus, akan tetapi karena mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga bahkan menjkiwai masyarakat. Demikian lamanya mereka memegang tampuk kekuasaan, masyrakat percaya dan mengakui kekuasaannya. Kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada mereka yang mempunyai wewenang tradisional biasanya mempunyai fungsi memberikan ketenangan pada masyarakat. Karenanya masyrakat selalu mengikatkan pada tradisi. Wewenang tradisional dapat juga berkurang bahkan hilang, antara lain karena pemegang wewenang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan zaman;

3. **Wewenang legal; rasional,** yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum (peraturan perundangan) yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum disini dipahamkan sebagai kaedah-kaedah yang telah diakui serta ditaati masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara.

Selanjutnya *"power"* dapat diartikan sebagai kekuasan. Kekuasaan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Penilaian baik buruknya suatu kekuasaan tergantung dari kegunannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat. Kekuasan senantiasa ada dalam setiap masyarakat baik yang sederhana maupun masyarakat yang besar atau rumit susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul makna yang pokok dari kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Kekuasaan terdapat disemua bidang kehidupan yang mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Pada umumnnya kekuasaan yang tertinggi berada pada organisasi yang dinamakan "negara". Secara formal negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, kalau perlu dengan paksaan. Negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan lebih rendah derajatnya. Itulah yang dinamakan

kedaulatan (sovereinity). Adanya kekuasaan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu, rela atau karena terpaksa. Apabila kekuasan dijelmakan pada diri seseorang, biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut.

Uraian otoritas dan power tersebut diatas akan lebih jelas bila dibagi pada bagian- bagian berikut ini :

1. Elite Power

Elite power dapat diartikan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki lebih banyak kekuasaan dibanding dengan yang lain pada bidang atau klas sosialnya masing-masing. Misalnya pimpinan-pimpinan politik, pemimpin-pemimpin partai, orang-orang kaya (konglomerat), pemimpin organisasi besar, pimpinan pemerintahan/ administrasi negara, pimpinan organisasi pemuda, pimpinan perguruan tinggi dan lain sebagainya.

Kaum elitis terkemukan misalnya Mosca, Pareto, dan Michels (dalam Mas'oed, 1989:78-79) menyebutkan pada intinya ada lima azas umum yang terdapat pada elite power yaitu :

a. Elite power, seperti halnya barang-barang sosial lainnya didistribusikan dengan tidak merata;
b. Pada hakekatnya, orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka yang tidak memilikinya;
c. Secara internal, elite itu bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok;

d. Elite itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas;

e. Kelompok elite itu pad hakekatnya bersifat otonom.

Dengan demikian kita dapat memandang sistem politik sebagai terdiri dari lapisan-lapisan atau dengan kata lain berstratifikasi.

Stratifikasi tersebut dapat dilukiskan pada gambar berikut ini :
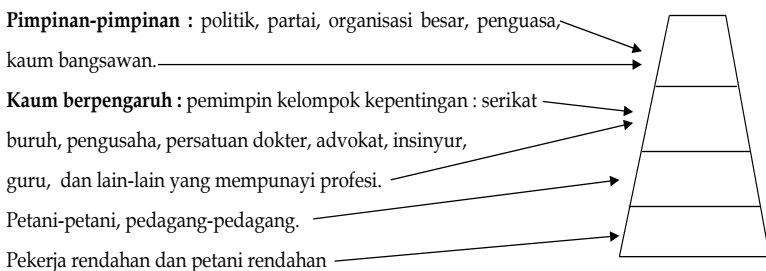
Sumber : *The Web Of Government (dalam soekanto, 1990:309).*

Dipuncak piramid ini terletak orang-orang yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijaksanaan, merupakan kelompok elit. Karena besarnya pengaruh kelompok elite ini dalam masyarakat, maka dapat pula merupakan faktor penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan/administrasi negara.

2. Community Power

Istilah ***Community power*** dapat diterjemahkan sebagai kekuasaan masyarakat setempat. Istilah tersebut menunjuk pada

kekuasaan warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Masyarakat setempat biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggal atau kesukuan. Ditambah lagi masyarakat setempat mempunyai perasaan kebersamaan, yaitu seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan. Karena adanya ikatan batin, rasa kedaerahan, kesukuan, masyarakat setempat dengan mudah dan cepat membuat ikatan solidritas yang membentuk suatu kekuatan atau kekuasan untuk menentang atau mendukung suatu kebijakan. Untuk itu masyarakat setempat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemerintahan/administrasi negara.

3. The Rulling Class

The rulling class merupakan sekelompok kecil masyarakat yang menjalankan kedaulatan negara dalam bentuk kekuasan untuk memerintah. Dalam kenyataannya kelompok ini yang dinamakan eksekutif. Di Indonesia kelompok ini dipimpin oleh presiden dan pembantu-pembantunya yang dinamakan kabinet yang menjalankan kedaulatan negara dibidang pemerintahan/ administrasi negara mendapat mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di daerah kelompok ini lebih dikenal dengan Kepala Wilayah/Daerah, Kepala Wilayah Departemen dan Kepala Dinas Otonom. Dalam kenyataannya ada gejala tidak puas dari (orang yang diperintah)

mempunyai pengaruh terhadap kebijaksanaan yang dijalankan the rulling class. Golongan yang berkuasa tidak mungikin bertahan terus tanpa didukung olerh masyarakat. Karena itu golongan tersebut senantiasa berusha untuk membenarkan kekuasaannya terhadp masyarakat, dengan maksud agar kekuasannya dapat diterima masyarakat sebagai kekuasan yang legal dan baik. Oleh sebab itu, golongan yang berkuasa harus berusaha untuk menanamkan kekuasannya dengan jalan menghubungkannya dengan kepercayaan dan perasaan-perasaan yang kuat didalam masyarakat bersngkutan, yang pada dasarnya berwujud dalam nilai dan norma.[]

BAB V

PENGARUH EKOLOGI TERHADAP PEMERINTAHAN/ ADMINISTRASI NEGARA

A. Pengaruh Fungsional

Bila kita menganalisis pengaruh ekologi terhadap pemerintahan/ /administrasi negara kita tidak bisa lepas dari pemahaman konsep ekologi dan dimensi-dimensinya, serta pemaahaman konsep pemerintahan. Sebagaimana telah diuraikan ekologi adalah suatu ilmu yang menyelidiki hubungan pengaruh timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya. Sedangkan pemerintahan/ /administrasi negara adalah suatu kegiatan, proses atau suatu prosedur bagaimana menjalankan perbuatan pemerintah oleh suatu organisasi kekuasan negara. Dengan demikian pemerintahan/ /administrasi negara dapat dianalogkan sebagai organisme yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan dimensi-dimensi ekologi pemerintahan/administrasi negara.

Untuk memahami pengaruh fungsional ekologi terhadap pemerintahan/administrasi negara sebaiknya kita mengacu kepada teori struktural fungsional dari K. Marton (dalawm Ritzer, terjemahan Alimandan, 1985:25). Konsep muatan teori ini adalah

fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya ialah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain.

Berdasrkan teori struktural fungsional, maka ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik anatra lingkungan dengan pemerintahan/administrasi negara mempunyai pengaruh yang fungsional terhadap pemerintrahan. Fungsi ini berarti apabila pemerintah/administrasi negara dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau secara positif dari semua dimensi atau faktor-faktor lingkungan fisik dan sosial dimana kegiatan pemerintah itu berlangsung. Misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan dan teknologi jelas fungsional bagi pemerintahan/administrasi negara. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pemerintahan/administrasi negara jika dimanfaatkan hubungan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi. Tetapi sebaliknya ekologi dapat pula menimbulkan akibat-akibat yang negatif sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

B. Pengaruh Disfungsional

Ekologi akan memberikan pengaruh disfungsional terhadap pemerintahan/administrasi negara, jika pemerintah tidak dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dari semua dimensi atau

faktor lingkungan dimana kegiatan pemerintahan/administrasi negara berlangsung. Misalnya : mengeksploitasi sumber kekayaan alam secara berlebih-lebihan yang pada akhirnya dapat merusak lingkungan hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Supaya manajemen pemerintahan/administrasi negara dapat mencapai tujuan atau sasaran secara efektif dan efisien maka diperlukan pengkajian dan pemahaman terhadap ekologi pemerintahan/administrasi negara secara baik pula. Karena pemerintah merupakan organisme yang dalam proses kegiatannya tidak terlepas dari pengaruh timbal balik natara pemerintahan/administrasi negara dengan lingkungan dimana kegiatan pemerintahan/ administrasi negara itu dijalankan;
b. Dimensi atau faktor lingkungan pemerintahan/ administrasi negara dapat berupa lingkungan fisik (lebih dikenal dengan tri gatra) dapat pula berupa lingkungan sosial (panca gatra);
c. Ekologi tidak saja mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pemerintahan/administrasi negara, tetapi dapat pula memberikan pengaruh fungsional dan disfungsional terhadap pemerintahan/ administrasi negara. Oleh karena itu sangat diharapkan pemerintah dapat mengendalikan dan memanfaatkan secara baik semua potensi lingkungan dalam rangka peningkatan kemampuan pembangunan.[]

LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI
Nahdlatul Ulama

DAFTAR PUSTAKA

Adimihardja, Kusnaka. 1983. *Kerangka Studi Antropologi Sosial Dalam Pembangunan.* Bandung : Tarsito.

Adiwikarta, Sudardja. 1991. *Beberapa Issue Sosiologi Tentang Masyarakat yang Sedang Membangun.* Bandung : Program Pascasarjana UNPAD.

Andrew, Mc C. dan Chia Lin Sen. 1982. *Too Rapid Rural Development*. Athens : Ohio University Press.

Arief, Sritua dan Adi Sasono. 1981. *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan.* Jakarta :Lembaga Studi Pembangunan.

Babbie, Earl R. 1989. *The Practice of Social Research*. Second Edition. California : Wadsworth Publishing Company Inc.

Beals, Ralph L. dan Harry Hoijer. 1961. *To Anthropology*. New York: The Macmillan Company.

Bellone, Carl J. 1980. *Organization Theory and The New Public Administration.* Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Carrell, Michael R , Elbert Norbert F dan Hotfield Robert D. 1995. *Human Resource Management : Global Strategies For Managing A Diverse Work Force*. New Jersey Englewood Cliffs: Prentice Hall Internasional Inc.

Cernea, Michael M. 1991. *Putting People First Sociological Variables in Rural Development.* Wahington D.C. : Oxford University Press.

Effendi, Sofian, T. Keban Yeremias, Ichlasul Amal, Warsito Utomo, dan Hadriyanus Suharyanto. 1989. Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan Administrasi Suatu Analisis Retrospektif dan Prospektif. *Journal Seri Monograf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*. Yogyakarta.

Etzioni, Amitai. 1964. *Modern Organization.* New York : Prentice Hall Cliffs. French, Wendell dan Bell Cecil H. 1978. *Organization Development*. Second Edition. Englewood Cliffs : Prentice Hall.

Fayol, Henri. 1916. *General and Industrial Management.* Terjemahan ke Dalam Bahasa Inggris Oleh Constance Storrs, 1949. London: Pitman

Garna, Judistira K. dan Rustam A. Sani. 1990. *Antropologi Sosialogi di Indonesia dan Malaysia Teori Pengembangan dan Penerapan*. Malaysia: UKM.

Garna, Judistira K. 1992. *Teori-teori Perubahan Sosial.* Bandung : Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

---------------. 1996. *Ilmu-ilmu Sosial : Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Goldthorpe, J.E. 1988. *The Sociology of the Third World: Disparaty and Development.* Second Edition. Cambridge University Press.

Guest, David. 2001. Human Resource Management : The Worker's Verdict. *Journal Human Resource Management*. 9.3 pp 5-12.

Grusky, David B. (ed.). 1994. *Social Stratification : Class, Race, and Gender In Sociological Perspective*. San Francisco : Westview Press.

Hambrick, D. C. 2000. Environmental Scanning and Organizational Strategy. *Journal Strategic Management*. 3 (2), 159-174.

Hans Dieter Evers. 1988. *Teori Masyarakat.* Terjemahan Thomas Rieger. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Harmon, Michael M. dan Richard T. Mayer. 1986. *Organization Theory for Public Administration.* Boston : Little, Browm and Company.

Harvey, Don dan R. Bruce Bowin. 1996. *Human Resource Management, Experiential Approach*. Boston : Prentice Hall.

Hays, William L. 1969. *Qualification in Psychology*. New Delhi: Prentice Hall of India.

Heady, Ferrel. 1991. *Public Administration, A Comparative Perspective,* New York : Marcel Dekker, Inc.

Henry, Nicholas. 1989. *Public Administration And Public Affairs*. Fourth Edition. Georgia : Prentice Hall.

Hersey, Paul and Kenneth H. Blanchard dan Dewey E. Johnson. 1996. *Management of Organizational Behavior : Utilizing Human Resources.* New Jersey : Prentice Hall, Inc.

Hicks, Herbert and G. Ray Gullet. 1987. *Organisasi Teori dan Tingkah Laku.* Terjemahan G. Kartasapoetra. Jakarta : Bina Aksara.

Hodgetts, Richard M. 1982. *Management : Theory, Process and Practice*. New York : Dryden Press.

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1996. *Sosiologi Jilid I dan Jilid II*. Terjemahan M. Z. Lawang. Jakarta : Erlangga.

Koentjaraningrat. 1992. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan.* Jakarta : P.T. Gramedia.

Miller, Delbert C. 1983. *Handbook of Research Design and Social Measurement.* New York : Longman Inc.

Nigro, Felix A. dan Nigro Lloyd G. 1984. *Modern Public Administration.* New York : Harper & Row Publishers.

Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. New York : A Plume Book.

Parsons, Talcott, Edward A. Shills. 1962. *Toward a General Theory of Action.* Massachusetts : Harvard University Press.

Parsons, Talcott. 1964. *The Social System*. Toronto : Collier-Macmillan.

Parsons, Talcott, Edward Shils, Kaspar D Naegele, dan Jesse R. Pitts. 1965. *Teories of Society, Foundations of Modern Sociological* Theory. New York : The Free Press.

Redford, Emmette S. 1975. *Ideal and Practice in Public Administration.* Alabama : University Alabama Press.

Rusidi. 1993. *Metode dan Teknik Penelitian Ilmu-ilmu Sosial.* Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.

Riggs, Fred W. 1986. *Administrasi Pembangunan.* Terjemahan Lukman Hakim. Jakarta : CV Rajawali.

Ritzer, George. 1980. *Sociology : A Multiple Paradigm Science.* Boston: Allyn and Bacon Inc.

--------------- . 1992. *Sociological Theory*. Edisi Ketiga. Singapore: Mc Graw.

Robbins, Stephen P. 1995. *Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications.* United States of America: Prentice Hall, Inc.

Roberts, Margaret. 1974. *An Introduction to Town Planning Techniques*. London : Hutchinson of London.

Rogers, Everet M. 1969. *Modernization Among Peasant : The Impact of Communication.* New York : Halt Rieviehart & Winston.

Rogers, Everet M. dan F. Floyd Shoemaker. 1971. *Communication of Innovation.* New York : The Free Press.

Rosenbloom, David H. 1989. *Public Administration-Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector.* Second Edition. Singapore : Mc Graw Hill International Editions.

Salim, Emil. 1976. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik , Untuk organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta : Grasindo.

Santoso, Priyo Budi. 1993. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Senge, Peter M. 1990. *The Fifth Discipline the Art and Practice of Learning Organization.* New York : Currency Double Day.

Schumacker, Rendall E dan Richard G Lomax. 1996. *A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling*. Mahwah, New Jersey: LEA.

Shafritz, Jay M. dan Albert C. Hyde. 1987. *Classics of Public Administration.* California : Pacific Grove.

Shrode, A William dan Voich Jr. 1974. *Organization and Management Basic System Concept.* Homewood, Illinois : Richard D Irwin Inc.

Sufian. 1995. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press.

--------------- . 1997. *Manajemen Pembangunan Pedesaan.* Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press.

--------------- . 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Pekanbaru : Universitas Islam Riau Press.

--------------- . 2003. *Manajemen Strategis.* Pekanbaru : Universitas Islam Riau Press.

Sukirno, Sardono. 1979. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor.

Taylor, Frederick W. 1911. *The Principles of Scientific Management*. New York : Harper.

Terry, G.R. 1975. *Principles of Management*. Georgetown, Ontario: Irwin-Dorsey Limited.

Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja, AR.. 1988. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan.* Jakarta : LP3ES.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. *Perecanaan Pembangunan.* Jakarta: Gunung Agung.

---------------.1993. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Penerapan.* Jakarta : LP3ES.

Winardi. 1990. *Manajemen.* Bandung : Mandar Maju.

---------------. 1992. *Manajemen Perilaku Organisasi.* Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.

---------------. 1999. *Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung : Mandar Maju.

Winardi dan Karhi Nisjar. 1997. *Manajemen Strategik.* Bandung: Mandar Maju.

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D. Lahir di Teluk Pinang, Gaung Anak Serka, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 29 Desember 1966. Meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) dan Magister Hukum (S-2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, memperoleh gelar Magister Manajemen (S-2) dari Sekolah Tinggi Manajemen "IMMI" Jakarta, sedangkan gelar Doktor (S-3) diperoleh dari Universitas Utara Malaysia, Kedah Kuala Lumpur.

Penulis merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan. Di Samping itu, Penulis juga mengajar di beberapa Universitas di Jakarta dan Riau, serta menjadi Pembicara di berbagai Seminar dan Pelatihan yang diadakan oleh para pengusaha, akademisi, birokrat, pemuda, mahasiswa dan para santri.

Beberapa aktivitas organisasi yang telah digeluti, antara lain: Sekretaris dan Ketua DPD KNPI RIAU, Pengurus DPP KNPI, Pengurus DPP AMPI dan Ketua Umum AMPI RIAU, Pengurus DPD Partai Golkar Riau, Ketua Umum DPD Partai Golkar RIAU, Ketua Umum Masyarakat Perhutanan Indonesia Reformasi Riau, Ketua Umum BPD GAPENSI Riau, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Riau, Ketua KADINDA Riau, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Riau dan Ketua APKASI/BKKKS, serta Pengda PSSI RIAU.

Dalam bidang Politik, penulis pernah menjadi Anggota DPRD Riau periode 1999-2003 dan pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir selama dua (2) periode berturut-turut, yaitu periode 2003-2008 dan 2008-2013. Setelah purna tugas dari jabatan sebagai bupati, saat ini penulis mengabdikan diri dan *concern* terhadap pengembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis yakin, melalui pendidikan tinggi dan berkualitas akan mengantarkan generasi bangsa menuju kesuksesan yang gemilang.

Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H., M.Si. Lahir di Pulau Cawan, Mandah, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 12 Februari 1967. Gelar Sarjana Hukum Ketatanegaraan (S-1) Tahun 1985-1989 diraihnya di Universitas Islam Riau Pekanbaru, Magister Administrasi Publik (S-2) Tahun 1992-1994 dan Doktor Ilmu Administrasi (S-3) Tahun 1997-2001 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Hingga saat ini bekerja sebagai Dosen tetap dan Guru Besar FISIP Universitas Islam Riau, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau, Dosen Pascasarjana UNRI, dan Dosen Pascasarjana Universitas Surapati Jakarta. Jabatan yang di emban saat ini sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UIR dan Direktur Pascasarjana Kerjasama UIR-UNPAD.

Selain mengajar, Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis merupakan ketua dan peneliti pada Pusat Penelitian Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (P2OD & PM) Universitas Islam Riau, Anggota Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Gubernur Riau (TPK2 GUBRI) Tahun 2003-2008, Staf Ahli Konsultan The Institute for Decentralization and Development Studies (InDDeS), Staf Ahli Peneliti pada Indonesian Society for Democracy and Peace (ISDP), anggota Advocat dan Konsultan Hukum (AAI). Penulis aktif menulis di berbagai media cetak dan elektronik.

Jl. Dongkelan No. 357 Krapyak Kulon,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 0821 34 797 663
email: one_trussmedia@yahoo.com

ISBN 978-602-0992-43-3
9 786020 992433